



Jurnal

KHAZANAH INTELEKTUAL

**KHAZANAH INTELEKTUAL MEMUAT TULISAN HASIL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN GAGASAN YANG BELUM PERNAH DIPUBLIKASIKAN
JURNAL KHAZANAH INTELEKTUAL TERBIT 3 (TIGA) KALI
DALAM SETAHUN**

Penanggung Jawab	: Kepala Balitbangda Provinsi Jambi
Pimpinan Redaksi	: Dr. Susi Desmaryani, SE., MM.
Wakil Pimpinan Redaksi	: Dr. Yuliatin, S.Ag, M.Hi
Editor I	: M. Rialdi Syaputra, S.E, M.E.
Editor II	: Herlina, S.P., M.Si.
Editor III	: Dr. Vinni Aprilianti, S.STP, M.E
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Henny Indrawati, S.P., M.M. (Ilmu Pendidikan/ Universitas Riau, Pekanbaru) : Dr. Rusdin S.E.,M.Si (Ilmu Manajemen/ Universitas Padjadjaran, Bandung) : Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E., M.M. (Ilmu Manajemen Keuangan/Universitas Padjadjaran,Bandung) : Dr. Ir. Hutwan Syariffudin.,M.P (Ilmu Pertanian/ Universitas Jambi) : Dr.Syaparuddin.S.E,M.Si.CIQaR,.CIQaN (Ilmu Ekonomi/ Universitas Jambi) : Dr. M. Zahari MS.,S.E.,M.Si (Ilmu Ekonomi/ Universitas Batanghari, Jambi)
Sekretariat	: 1. Dra. Nurhayati 2. RR. Dwi Betharia,Endahayu, S.E 3. Suarman, S.E, M.AP 4. Yessi Febriani, S.E. 5. Wahid Nur Rahim

ALAMAT REDAKSI :

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Jl. R.M. Nur Atmadibrata No. 1A Telanaipura Jambi
Telp/Fax. (0741) 669352
Email : redaksijurnallitbang03@gmail.com/balitbangdajambi@gmail.com

Redaksi menerima karya ilmiah atau artikel hasil penelitian, kajian, gagasan di bidang ilmu pengetahuan dan Inovasi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengubah makna substansi tulisan



Jurnal

KHAZANAH INTELEKTUAL

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 1A Telanaipura

Telp. (0741) 669352 Fax. (0741) 60450

Email : redaksijurnal03@gmail.com/balitbangdajambi.1@gmail.com

DariRedaksi

Jurnal Khazanah Intelektual mendedikasikan diri sebagai wadah dari publikasi artikel para peneliti dan jabatan fungsional lainnya, dosen serta mahasiswa. Sedangkan artikel yang disajikan fokus pada kebijakan pembangunan Daerah. Artikel yang masuk ke redaksi akan diseleksi terlebih dahulu dan selanjutnya penulis diarahkan sesuai hasil review dan diselaraskan dengan gaya selingkung Jurnal Khazanah Intelektual. Pada Volume Enam Edisi Ketiga Tahun 2022 memuat enam artikel dengan judul :1) *Utilization of The National Building to Increase Regional Original Income of Sungai Penuh City*; 2) Implementasi Kebijakan *Response Time* Tujuh Menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya; 3) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi; 4) *Model Efektivitas Promosi Produk Lokal Agroindustri Menggunakan Platform Sosial Media*; 5) Analisis Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 dan 6) Analisis Komoditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021.

Redaksi mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada Mitra Bestari yang berkenan memberikan masukan dan mereview tulisan pada edisi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada anggota redaksi yang telah meluangkan waktu agar Jurnal Khazanah Intelektual ini dapat terbit dengan baik. Tak luput pula ucapan terima kasih disampaikan kepada penulis yang telah berkenan mempublikasikan artikelnya di Jurnal Khazanah Intelektual.

Akhir kata, kami mengundang rekan sejawat peneliti dan praktisi berpartisipasi dalam mengirimkan naskah untuk dipublikasikan pada Jurnal Khazanah Intelektual ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta pihak lainnya sangat diharapkan. Selamat membaca, semoga artikel yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberi manfaat dan inspirasi.

SALAM REDAKSI

DAFTAR ISI

Strategi Pemanfaatan Gedung Nasional Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh

Oleh : Asti Harkenani dan M.Rialdi Syaputra.....1482 - 1499

Implementasi Kebijakan Response Time Tujuh Menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya

Oleh : Mirotin E. Wahyuningsih dan Rio Febriannur R..... 1500 - 1518

Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

Oleh : Amrizal dan Irmanelly.....1519 - 1533

Model Efektivitas Promosi Produk Lokal Agroindustri Menggunakan Platform Sosial Media

Oleh: Musnaini, Asrini, Ida Ketut Mudhita.....1534 - 1544

Analisis Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSF) Di Indonesia dari Tahun 2010 - 2020

Oleh: Trie Hierdawati dan Rian Dani1545 - 1554

Analisis Komoditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021

Oleh: Ardi Afrizal.....1555 - 1566

STRATEGI PEMANFAATAN GEDUNG NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

*(Utilization of the National Building to Increase Regional Original Income of
Sungai Penuh City)*

Asti Harkeni*, M.Rialdi Syaputra**

*Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi,
Email : asti.harkeni@gmail.com; rialdi_16@yahoo.com

Diterima : 10 September 2022; Direvisi : 9 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.170>

Abstract

Sungai Penuh City is a city resulting from the division that has many regional assets that have not been identified and managed properly. One of them is Gedung Nasional, which is a regional asset as a result of the handover from Kerinci Regency in 2021. The purpose of the research is to formulate a model for the utilization of Gedung Nasional as a multi-purpose building and determine the strategy for optimizing the utilization of Gedung Nasional to increase the Regional Original Income of Sungai Penuh City. This study uses a mixed method approach through observation, documentation and interviews with the government, community leaders and filling out a purposive sampling questionnaire. The data analysis tool uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) with a Saaty scale approach starting from a weighted value of 1 to 9. The results of the study obtained that the optimization strategy for the utilization of Gedung Nasional to increase the Regional Original Income of Sungai Penuh City is (1) improving/adding facilities and services, (2) requiring the use of Gedung Nasional facility as a standard for Sungai Penuh City physical activity.

Keywords: Gedung Nasional; Local Revenue; Sungai Penuh City

Abstrak

Kota Sungai Penuh merupakan kota hasil pemekaran yang memiliki banyak aset daerah belum teridentifikasi dan dikelola dengan baik. Salah satunya adalah Gedung nasional yang merupakan aset daerah hasil serah terima dari Kabupaten Kerinci tahun 2021. Tujuan penelitian adalah merumuskan model pemanfaatan Gedung Nasional sebagai gedung multiguna dan menentukan Strategi pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* melalui observasi, dokumentasi serta wawancara dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat dan pengisian kuisioner *purposive sampling*. Alat analisis data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan pendekatan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Hasil penelitian diperoleh strategi pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh antara lain adalah: (1) memperbaiki/menambah fasilitas dan pelayanan, (2) mewajibkan pemakaian fasilitas Gedung Nasional sebagai standar kegiatan fisik Kota Sungai Penuh.

Kata kunci: Gedung Nasional; Pendapatan Asli Daerah; Kota Sungai Penuh

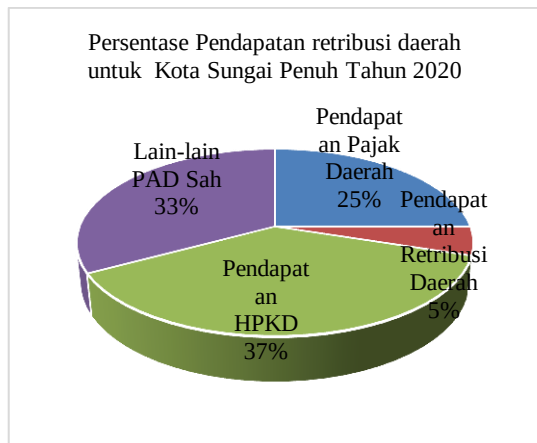
PENDAHULUAN

Kota Sungai Penuh merupakan kota hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Republik Indonesia, 2008). Kota Sungai Penuh dengan ibukotanya Sungai Penuh memiliki luas wilayah ± 39.150 Ha dan 23.177,6 Ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Jumlah penduduknya yang tercatat pada tahun 2020 adalah sebanyak ± 91.739 jiwa (BPS, 2020).

Kota Sungai Penuh sebagai kota hasil pemekaran memiliki banyak aset daerah yang belum teridentifikasi dan dikelola dengan baik. Pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sehingga dapat memberikan penerimaan bagi daerah untuk pembangunan. Tujuan optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta mendukung peningkatan PAD (Anartany & Suseno, 2018). Namun praktek di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sulit untuk melakukan pemanfaatan aset dikarenakan belum tertibnya pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga selain banyak aset yang

penggunaannya tidak optimal dan sulit untuk dikembangkan pemanfaatnya. Suatu daerah memiliki potensi kekayaan yang melimpah namun sering kali karena tidak dikelola dengan baik, maka daerah tersebut seolah-olah miskin dan tidak memiliki pendapatan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya.

Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk tahun 2008 sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran (TA) 2020 sudah mengeluarkan berbagai perangkat peraturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah melalui Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 970/KEP.13/2020 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020. Tahun 2020 kontribusi penerimaan PAD Kota sungai Penuh dari pendapatan retribusi daerah relatif kecil dapat dilihat pada Gambar 1, yaitu hanya 5 %.



Sumber : BPK, 2021

Gambar 1. Persentase perbandingan PAD dari pendapatan retribusi daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020

Menurut Riyono, (2013) dalam penelitiannya, pemanfaatan aset tanah memerlukan suatu perubahan kebijakan daerah (*policy reform*), strategi dan penguatan kemitraan kelembagaan sebagai upaya pendayagunaan pengelolaan kekayaan daerah dan pemanfaatan teknologi administrasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Telah dilakukan juga penelitian yang terkait strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh Jumanah, (2019), Widiastuti & Risandewi, (2020), Adhi, (2016).

Perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan gedung multiguna untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai

Penuh. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan model pemanfaatan Gedung Nasional sebagai gedung multiguna yang representative dan mampu menampung aktifitas masyarakat Kota Sungai Penuh dan menentukan strategi pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh. Permasalahan Pemerintah Daerah dalam mengelola pemanfaatan aset daerah menyebabkan penerimaan PAD tidak maksimal. Dari informasi di atas didapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana strategi kebijakan dalam optimalisasi pemanfaatan Gedung nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan aset daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri, 2016). Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian

nilai. Menurut Siregar, (2018) beberapa tahap manajemen aset yang dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta optimalisasi aset, di mana jika tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah.

Optimalisasi Pemanfaatan

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sehingga optimalisasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan yang paling baik untuk mencapai hasil yang tertinggi yaitu optimal. Keterbukaan informasi oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan asset yang akan dikerjasamakan belum sepenuhnya dapat menggambarkan informasi terhadap potensi kerjasama pemanfaatan aset daerah, dan lain-lainnya (Adhi, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (Ardiani, 2020).

Aset Daerah

Aset adalah sesuatu atau barang yang dimiliki oleh seseorang, badan usaha, atau instansi, yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial dan nilai tukar, di mana aset tersebut dapat berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) atau barang bergerak (modal, simpanan, hutang) yang dapat dianggap sebagai harta kekayaan (D. Siregar, 2004). Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah, pengelola aset daerah harus mengikuti prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas yang dipenuhi paling tidak meliputi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan (Soleh & Rochmansjah., 2010).

Menurut Mahmudi, (2010) siklus pengelolaan asset daerah secara umum meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. perencanaan: rencana kebutuhan barang milik daerah dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga,
2. pengadaan, pengadaan aset daerah mengikuti ketentuan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah,

3. penggunaan atau pemanfaatan, kejelasan status penggunaan/pemanfaatan disewakan, leasing, pinjam pakai, KSO, BOT/BTO,
4. pengamanan dan peliharaan asset, meliputi administrasi, hukum & fisik;
5. penghapusan/pemindah tangan, berarti pemusnahan, pindah tangan mencakup: penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal.

Model Pemanfaatan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh

Pendayagunaan barang milik daerah dilakukan melalui bentuk-bentuk pemanfaatan yaitu :

1. **Sewa.** Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
2. **Pinjam Pakai.** Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
3. **Kerjasama Pemanfaatan.** Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

4. **Bangun Guna Serah.** Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
5. **Bangun Serah Guna.** Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan b Catatersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah melekat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), struktur tersebut dijelaskan Munir, (2003) sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, merupakan pendapatan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Elemen-elemen belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- c. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi Menurut Kurniawan, (2004) dibagi menjadi tiga :

1. Jasa umum yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya pelayanan kesehatan.

2. Jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penyediaan tempat penginapan dan usaha bengkel kendaraan.
3. Perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi :

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 1). Retribusi Pelayanan

- Kesehatan; 2). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 3). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk & Akta Catatan Sipil; 4). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 5). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 6). Retribusi Pelayanan Pasar; 7). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 8). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 9). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 10). Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 11). Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 12). Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 13). Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 14.) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 2). Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 3). Retribusi Tempat Pelelangan, (4) Retribusi Terminal; 4). Retribusi Tempat Khusus Parkir; 5). Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; 6). Retribusi Rumah Potong Hewan; 7). Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 8). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 9). Retribusi Penyeberangan di Air; dan 10). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2). Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3). Retribusi Izin Gangguan; 4). Retribusi Izin Trayek; dan 5). Retribusi Izin Usaha Perikanan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*Mixed Method*) merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode Pengumpulan Data primer dan sekunder, yaitu data Primer dengan mengambil langsung dari lokasi melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara dilakukan sebanyak enam responden dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat dan pengisian kuisioner secara *purposive sampling*. Data Sekunder diperoleh melalui instansi terkait dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen kebijakan, publikasi hasil penelitian dan berbagai referensi lainnya. Analisis statistika deskriptif dilakukan untuk menganalisis hasil wawancara dengan perwakilan Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Statistika deskriptif (*descriptive*

statistics) dianalisis menggunakan skoring dengan skala Likert dengan meresponden 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, sangat setuju, dan sangat tidak setuju. Penelitian ini berlokasi di Kota Sungai penuh, dengan rentang waktu pelaksanaan sekitar enam bulan dari Mei hingga Oktober 2021.

Model yang digunakan sebagai alat analisis data menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau Proses Hierarki Analitik (PHA). PHA merupakan suatu model permasalahan yang tidak mempunyai

struktur, yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif) ataupun masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) pada situasi yang kompleks dimana data/informasi statistik sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Dapat juga digunakan pada data kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi (Wardhono et al., 2012). Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9 seperti dijelaskan pada Tabel 1.

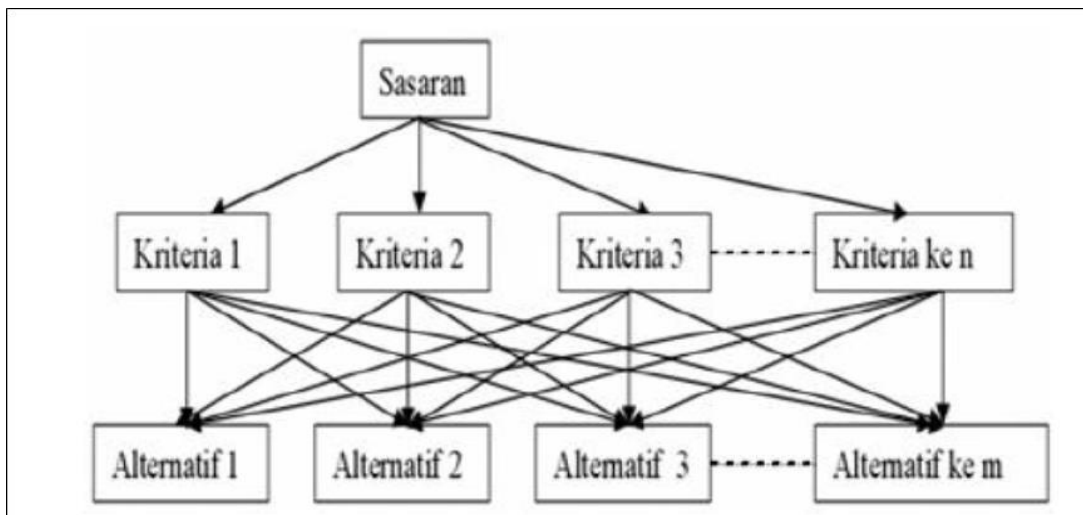
Tabel 1. Skala Banding Secara Berpasang

Intensitas Pentingnya	Defenisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya	Pertimbangan & pengalaman sedikit menyokong 1 elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu sangat penting ketimbang yang lainnya	Pertimbangan & pengalaman dengan kuat menyokong satu elemen atas yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen yang lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya	Bukti yang menyokong elemen satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yg mungkin menguatkan
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara diantara dua pertimbangan yg berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika aktivitas i mendpt 1 angka dibanding dgn aktivitas j maka j punya nilai kebalikannya dibandingkan dgn i	

Sumber : Saaty (1991)

Tahapan - tahapan dalam AHP sebagai berikut: (1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan; (2) Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan; (3) Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya; (4) Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemenp di dalam matrik yang

berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom; (5) Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi.; (6) Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki; (7) Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan.; (8.) Menguji konsistensi hirarki. Standarnya adalah $CR < 0,100$. Jika lebih dari nilai tersebut, maka penilaian harus diulangi kembali (Darmanto et al., 2014).

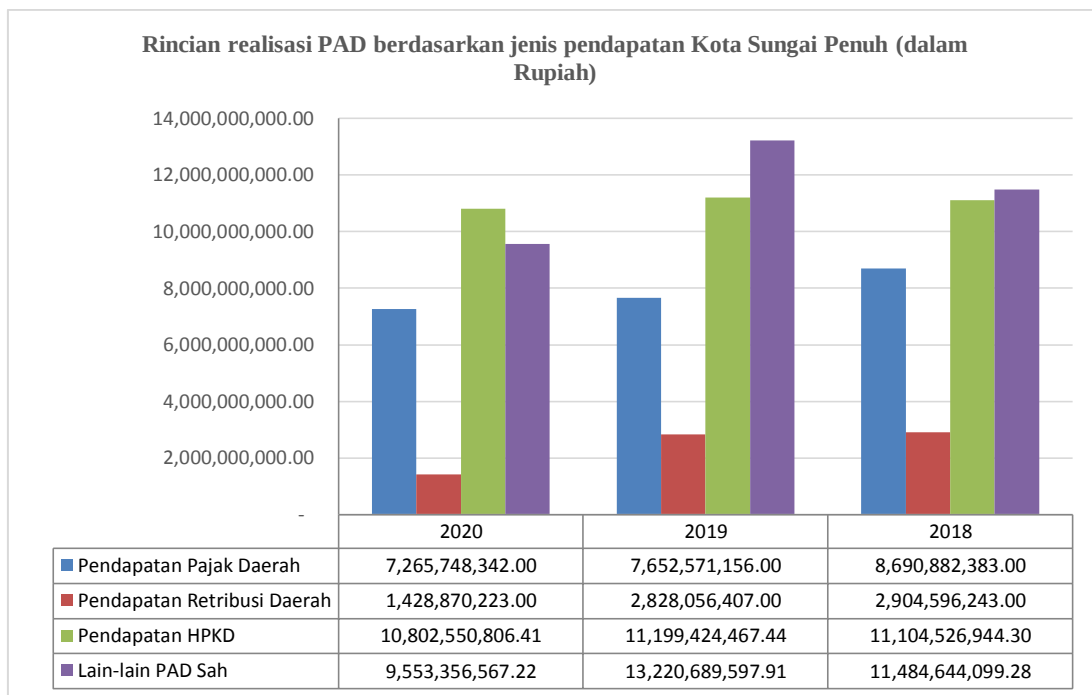


Gambar 2. Struktur Hierarki AHP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020. Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Sungai Penuh menganggarkan PAD sebesar Rp. 27.855.371.496,36 dengan realisasi sebesar Rp. 29.050.525.938,63 (BPK,

2020). Realisasi PAD tahun 2020 sebesar 104,9 % dari target yang di anggarakan. Data realisasi PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (HPKD) dan lain-lain PAD yang sah lebih rinci pada gambar 3.



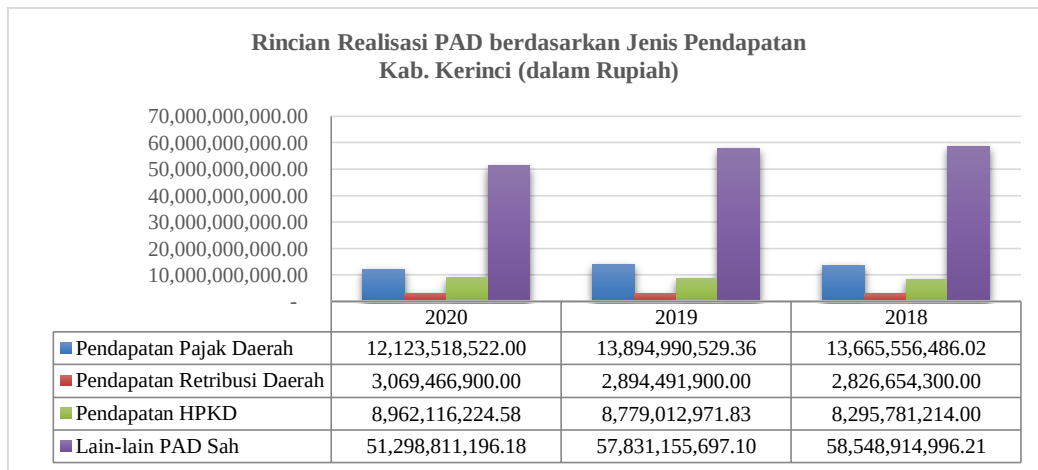
Sumber : (BPK, 2021)

Gambar 3. Rincian realisasi PAD berdasarkan jenis pendapatan untuk Kota Sungai Penuh (dalam rupiah)

Dalam kaitannya dengan rincian PAD Kota Sungai Penuh seperti ditampilkan pada Gambar 4, terlihat bahwa jenis pendapatan retribusi daerah paling rendah dari pada pendapatan lainnya. Mempertimbangkan pentingnya peningkatan pendapatan daerah Kota Sungai Penuh dari sumber non pajak maka perlu dikembangkan penerimaan PAD yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah. Peluang tersebut salah satunya di ambil dari Gedung multiguna antara lain Gedung Nasional. Gedung Nasional sudah diserahkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh pada Juni 2021, dimana pengelolaannya belum maksimal.

Sebelum penyerahan aset daerah berupa Gedung nasional dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menjadikan Gedung nasional sebagai salah satu PAD kabupaten dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Nilai rincian PAD yang diperoleh dari jasa retribusi usaha dapat dilihat pada gambar 4.



Sumber : (BPK, 2021)

Gambar 4. Rincian realisasi PAD berdasarkan jenis pendapatan untuk Kabupaten Kerinci (dalam rupiah)

Sejarah Gedung Nasional

Gedung Nasional merupakan monumen bersejarah masyarakat Kerinci yang dibangun pada tahun 1963. Lokasi Gedung Nasional berada di Kota Sungai Penuh, berdampingan dengan lapangan merdeka yang merupakan pusat aktifitas masyarakat. Gedung Nasional dibangun pada tanggal 28 Februari 1963 dan selesai pada tanggal 5 Oktober 1963.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari Dinas Pariwisata Kota Sungai Penuh, saat ini Gedung Nasional termasuk salah satu bangunan cagar budaya dan telah terdaftar dalam Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Sungai Penuh (Bappeda, 2016) sebagai benda cagar budaya, hanya belum ditetapkan dan terdaftar di register nasional cagar budaya sebagai bangunan cagar budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa (Republik Indonesia, 2010) : “Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria yaitu a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”. Gedung Nasional telah berdiri selama 58 tahun.

Gedung Nasional

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. Secara umum gedung dapat diartikan sebagai gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Pemanfaatan Gedung Nasional merujuk pada Peraturan Daerah

Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka Perda No 5 Tahun 2017 tersebut memasukkan PAD Gedung Nasional ke dalam Jenis Retribusi Jasa Usaha (Kabupaten Kerinci, 2017).

Tabel. 1 Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kab. Kerinci

No	Jenis Kekayaan daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	Gedung Nasional	Siang hari Jam 7.30 s/d 18.00 WIB	1.000.000,-
		Malam hari Jam 18.00 s/d 24. 00 WIB	1.500.000,-
		Siang dan Malam Jam 7.30 s/d 24 WIB	2.000.000,-

Sumber : Perda Kab. Kerinci No 5 Tahun 2017

Kota Sungai Penuh saat ini belum memasukkan pemanfaatan Gedung nasional dalam Peraturan Daerah atau lainnya disebabkan Gedung ini baru di hibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Gambar 5 Gedung Nasional :



Gambar 5. Gedung Nasional Kota Sungai Penuh

Analisa Sewa Berdasarkan Peraturan Daerah

Sejak diserahkannya Gedung Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Gedung Nasional akan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Sungai Penuh. Namun pertimbangan keberadaan Gedung Nasional sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Sungai Penuh, membuat pola pengembangan Gedung Nasional terbatas. Bangunan cagar budaya harus dijaga kelestariannya tanpa perbaikan dominan dan rehab.

Kota Sungai Penuh telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sungai Penuh, 2014) terkait PAD, namun dalam Perda tersebut tidak merinci dan menyebutkan tentang nama Gedung

dan bangunan yang dipungut. Berdasarkan Pasal 9 butir (b) Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi disebutkan seperti pada Tabel 2 :

Tabel. 2 Jenis & Nilai Tarif Gedung Berdasar Perda Nomor 3 Tahun 2014

Pemakaian Gedung	Jenis Tarif	Keterangan
Tarif Komersil	Gedung Pertemuan	- kapasitas $\geq$ 300 org : Rp. 300.000,- / hr - kapasitas 201 s/d 299 org : Rp. 250.000,- / hr - kapasitas $\leq$ 200 org : Rp. 200.000,- / hr
Tarif untuk Sosial/ Pendidikan	Gedung Pertemuan	- kapasitas $\geq$ 300 org : Rp. 200.000,- / hr. - kapasitas 201 s/d 299 org : Rp. 150.000,- / hr - kapasitas $\leq$ 200 org : Rp. 125.000,- / hr

Sumber : Perda Kota Sungai Penuh No 3 Tahun 2014

Kebijakan pengelolaan Gedung Nasional sebagai salah satu sumber PAD telah dilakukan oleh Kabupaten Kerinci sebelum Gedung Nasional diserahkan ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemkab Kerinci mengeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Kerinci, 2011), yang mengatur tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, seperti ditampilkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No 23 Tahun 2011

Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif
Gedung Nasional	a. Siang hari Jam 7.30 s/d 18.00 wib	1.000.000
	b. Malam hari Jam 18.00 s/d 24. 00 wib	1.500.000
	c. Siang dan Malam Jam 7.30 s/d 24. 00	2.000.000

Sumber : Perda Kab. Kerinci Nomor 23 Tahun 2011

Kedua Perda tersebut yaitu Perda Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 apabila disandingkan memiliki perbedaan cara memberikan nilai tarif. Berdasar dua Perda ini, yaitu perda Kab Kerinci dan Perda Kota Sungai Penuh tentang penetapan tarif untuk Gedung nasional dapat dibandingkan bahwa tarif

Gedung Nasional Sejak tahun 2011 sampai saat ini, tarif sewa dibedakan menurut jenis kegiatan. Apabila dibandingkan dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Jambi, 2019), dalam Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang besarnya tarif

retribusi jasa usaha untuk pemakaian sewa Gedung yang ada di Provinsi kekayaan daerah menyebutkan harga Jambi seperti pada Tabel 4 :

Tabel 4. Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha untuk Pemakaian Kekayaan Daerah (Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019)

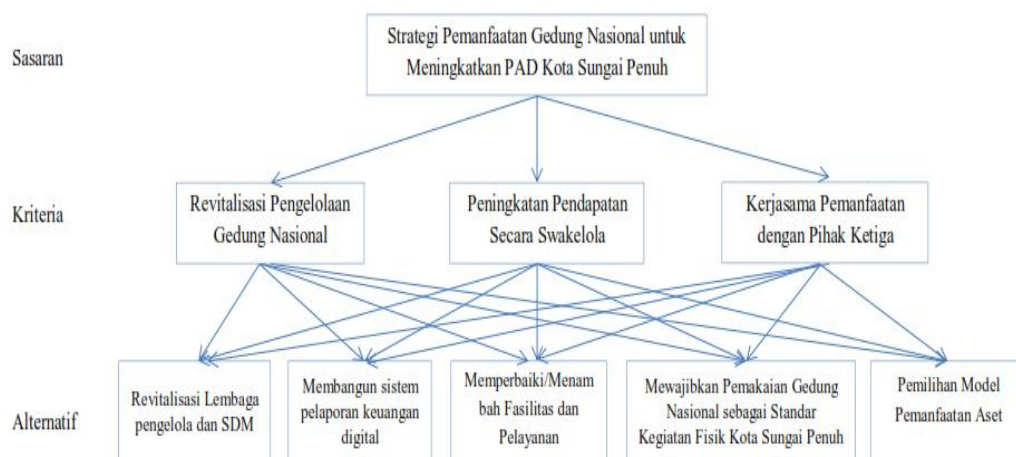
NO	JENIS	PEMAKAIAN/ PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Gedung Olah Seni dan Budaya (GOS) Kota Baru	– Siang pukul 07.30 s.d 17.00	Hari	3500000
		– Malam pukul 17.01 s.d 24.00	Hari	4000000
		– Siang dan malam	Hari	5500000
2	Gedung BKOW	– Siang pukul 07.30 s.d 17.00	Hari	3000000
		– Malam pukul 17.01 s.d 24.00	Hari	3500000
		– Siang dan malam	Hari	4000000
3	Gedung Dharma Wanita	– Siang pukul 07.30 s.d 17.00	Hari	1100000
		– Malam pukul 17.01 s.d 24.00	Hari	1600000
		– Siang dan malam	Hari	2200000
4	Gedung Diklat Kota Baru	– Aula I	Hari	5000000
		– Aula II: Siang pukul 07.30 s.d 17.00	Hari	750000
		– Siang dan malam	Hari	1000000
		– Ruang kelas: Siang	Hari	200000

Sumber : Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019

Gambaran mengenai perbandingan nilai sewa/tarif gedung atau bangunan seperti pada tabel-tabel di atas, menjadi acuan untuk menentukan nilai tarif sewa Gedung Nasional. Kota Sungai Penuh belum mencantumkan secara rinci mengenai sewa setiap bangunan atau Gedung dalam Perda Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Strategi Pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh

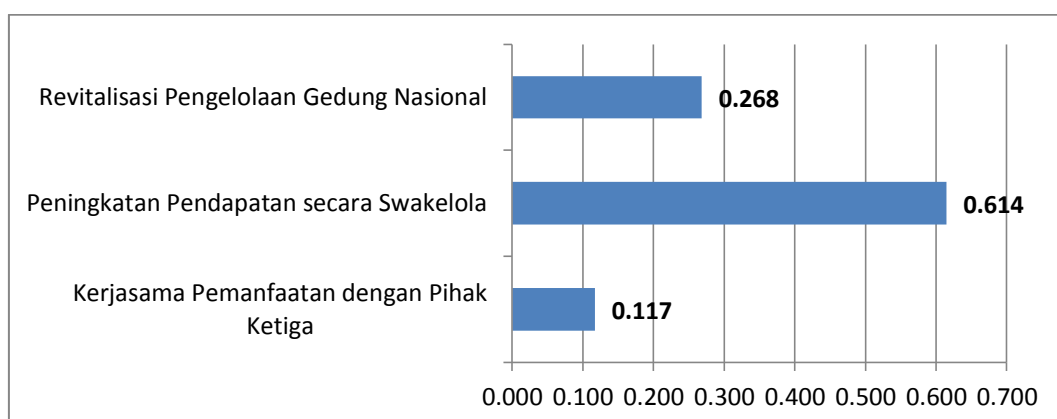
Upaya peningkatan PAD secara maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Melalui Focus Group Discution (FGD) dengan *stakeholders* Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, yaitu : BAPPEDA, BAKEUDA, DISBUDPAR, Dinas Pendidikan, BALITBANGDA, SEKDA Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Sungai Penuh dirumuskan sebanyak 5 alternatif strategi PAD terlihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Struktur Hierarki Pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh

Pembobotan dilakukan oleh 6 orang responden terhadap tiga pendekatan, yaitu (1) Revitalisasi pengelola Gedung Nasional; (2) Peningkatan pendapatan secara swakelola; dan (3) Kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga; hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan Peningkatan pendapatan

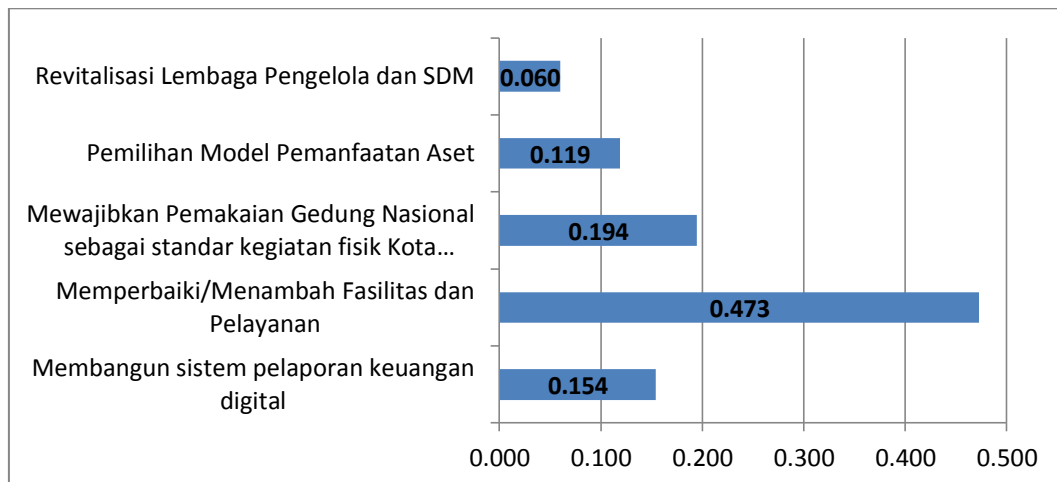
secara swakelola memperoleh bobot tertinggi, yaitu 0,614, diikuti secara berturut-turut oleh pendekatan revitalisasi lembaga pengelola Gedung Nasional sebesar 0,268 dan Kerjasama dengan pihak ketiga sebesar 0,117 dengan nilai consistency ratio sebesar 0.07069.



Gambar 7. Hasil pembobotan terhadap Pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh

Selanjutnya, penilaian terhadap alternatif/strategi secara keseluruhan menunjukkan adanya 5 strategi yang dengan nilai tertinggi pada alternatif /

strategi memperbaiki / menambah fasilitas dan pelayanan dengan nilai sebesar 0.473.



Gambar 8. Hasil pembobotan terhadap 5 strategi Pemanfaatan Gedung Nasional untuk meningkatkan PAD Kota Sungai Penuh

Kemudian diikuti oleh alternatif/strategi lainnya adalah: (1) Mewajibkan pemakaian gedung nasional sebagai standar kegiatan fisik di Kota Sungai Penuh (0.194), (2) Membangun sistem pelaporan digital (0.154), (3) Pemilihan Model Pemanfaatan Aset (0.119), dan (4) Revitalisasi lembaga pengelola dan SDM (0.060). Dengan nilai consistency ratio sebesar 0.077

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Model Pemanfaatan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh dapat berupa sewa, dan kerjasama pemanfaatan. Kota Sungai Penuh telah menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terkait PAD, Perda tersebut tidak merinci dan menyebutkan tentang nama Gedung dan bangunan yang dipungut.

2. Strategi Pemanfaatan Gedung Nasional adalah (1) Memperbaiki/Menambah fasilitas dan pelayanan, (2) Mewajibkan pemakaian fasilitas Gedung Nasional sebagai standar kegiatan fisik Kota Sungai Penuh, (3) Membangun sistem pelaporan keuangan digital (4) Pemilihan Pemanfaatan aset daerah (5)

Revitalisasi lembaga pengelola dan SDM.

Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah melalui pemanfaatan gedung nasional upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh antara lain melalui :

- a. Melakukan revitalisasi gedung nasional sehingga mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola retribusi jasa usaha, khususnya pengelola gedung nasional dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dengan mengirim Pegawai dalam berbagai pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. Melakukan Revisi terhadap Perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kurang mendukung unit kerja pengelola Gedung Nasional terkait dalam mencapai target retribusi jasa usaha.
- d. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi terkait pengelolaan gedung nasional secara berkala

dengan OPD terkait guna peningkatan penerimaan masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan .

Daftar Pustaka

- Adhi, S. (2016). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 38–43.
- Ardiani, S. (2020). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah KotaPalembang. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 4(1).
- Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 32–38. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21923>
- Budiaji, Weksi. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan* 2: 125-131.
- Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kreasi Wacana.
- BPK. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun 2018*. BPK.
- BPK. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2020* (Vol. 1, Issue 1).
- BPS. (2020). *Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten-Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa)*. BPS.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN. UPP AMP YKPN.
- Jumanah, N. S. dan. (2019). Strategi

- Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Karyana, A. (2005). Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1, 12.
- Kurniawan, panca dan A. P. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia. Bayumedia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Andi Offset.
- Munir, B. (2003). *Perencanaan Anggaran Kinerja (Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah)*. Mataram. Samawa Center.
- Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Pub. L. No. 5 (2017).
- Permendagri. (2016). *Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016*. 547. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Riyono, S. (2013). Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Siregar, D. (2004). *Doli2004, Manajemen Aset*, Yogyakarta: Gramedia Pustak. Gramedia Pustaka.
- Siregar, D. D. (2018). *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soleh, C., & Rochmansjah., H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, Pub. L. No. 25 (2008).
- Widiastuti, W., & Risandewi, T. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemberdayaan Aset Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(2), 133–145. <https://doi.org/10.36762/jurnaljate ng.v17i2.793>
- Walpole, Ronald E. (1995). *Pengantar Statistika* edisi ke-3. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESPONSE TIME TUJUH MENIT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SURABAYA

Implementation Of The Policy "Seven Minutes Response Time" at Fire Fighter and Rescue Department in Surabaya

Mirotin Eka Wahyuningsih¹, Rio Febriannur Rachman²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jalan Ahmad Yani Surabaya,
mirotineka@gmail.com

²Institut Agama Islam Syarifuddin, Jalan Wonorejo Kedungjajang Lumajang,
riofrachman21@gmail.com

Diterima : 12 September 2022; Direvisi : 10 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.171>

Abstract

The Surabaya City Government (Pemkot) is included in the ranks of the Regional Government (Pemda) with has much achievements from various award events in the field of innovation. On the 2022 Public Service Innovation Competition held by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, one of the innovations initiated by the Fire Fighter and Rescue Department in Surabaya or DPKP, named Seven Minutes Response Time in Surabaya, was selected as the Top 45 Praised Innovations in the general category. This article discusses the innovations in the aspects of formulation, implementation, evaluation, and bureaucratic reform. The theory used is the concept of public policy popularized by Hayat. The method in this study is qualitative through phenomenological approach. The results of this study indicate that the Seven Minutes Response Time conducted by DPKP Surabaya is implemented through stages in accordance with the theoretical flow outlined by the experts. The target is all citizens without any particular class/group divide, and is also in line with the sustainable development goals or SDGs that were resolved by the United Nations.

Keywords: *Phenomenology, Public olicy, Response time*

Abstrak

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya termasuk dalam jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dengan banyak prestasi dari berbagai ajang penghargaan di bidang inovasi. Pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu inovasi yang dicetuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya bernama Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya terpilih menjadi Top 45 Inovasi Terpuji kategori Umum. Artikel ini membahas tentang inovasi tersebut di aspek formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi birokrasi. Teori yang digunakan adalah konsep kebijakan publik yang dipopulerkan oleh Hayat. Metode dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Response Time 7 Menit yang dilakukan DPKP Surabaya diterapkan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur teoritik yang digariskan para pakar. Kebijakan Response Time 7 Menit ini bisa dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat karena sasarannya adalah seluruh warga tanpa sekat golongan/kelompok tertentu, dan selaras pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diresolusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Fenomenologi, Kebijakan publik, Responses time

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya termasuk dalam jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dengan banyak prestasi dari berbagai ajang penghargaan di bidang inovasi. Pada gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu inovasi yang dicetuskan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya bernama *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* terpilih menjadi Top 45 Inovasi Terpuji kategori Umum (KemenPAN-RB, 2022).

Terobosan ini secara resmi diluncurkan pada 2019 lalu. Pemicunya adalah problem dan padat penduduk, sehingga punya tingkat kerawanan terhadap bencana kebakaran yang tinggi. Kota ini memiliki luas wilayah mencapai 35.054 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 2.970.952 orang. Gedung-gedung tinggi disinyalir berada tak kurang dari empat ratus lokasi tersebar di seluruh wilayah Surabaya (Mukaromah, 2022).

Diperkirakan, pada jam-jam kerja atau Senin sampai Jumat pukul 09.00 hingga 17.00, jumlah manusia yang berada di kota ini mencapai lima

juta jiwa. Lima juta orang ini adalah jumlah total. Ada pun tambahan sekitar dua juta jiwa dari jumlah data yang ada, adalah penambahan dari para pekerja yang punya mata pencaharian di Surabaya, namun tinggal di kota-kota sekitar Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Jombang, bahkan Lamongan. Di tambah pula dengan para mahasiswa yang berasal dari kota-kota satelit itu, namun kuliah di Surabaya. (Subakir & Amal, 2022). Berdasarkan fakta dan data di atas, bisa dibayangkan betapa padatnya kawasan yang punya julukan Kota Pahlawan tersebut. Inovasi *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* diharapkan bisa memberikan percepatan dalam pelayanan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya, sehubungan dengan penyelamatan dan evakuasi orang maupun barang di lokasi kejadian (Nuraini, 2022). Inovasi *Response Time 7 Menit* adalah terobosan untuk memastikan bahwa waktu tunggu antara laporan adanya kebakaran dan petugas sampai di lokasi kejadian maksimal adalah tujuh menit.

Kebijakan yang diaplikasikan oleh DPKP Surabaya ini merupakan jawaban atas kebutuhan sebagai sebuah kota besar. Inovasi ini

melengkapi program lain yang juga telah diimplementasikan oleh DPKP Surabaya, seperti Srikandi Baruna atau petugas perempuan yang berada di satuan pemadam kebakaran, dan *Tim Rescue* atau satuan khusus petugas evakuasi serta penyelamatan. Dengan kata lain, terobosan yang dilakukan punya orientasi pemecahan masalah. Hal tersebut selaras dengan banyak teori klasik maupun kontemporer tentang kebijakan publik. Secara prinsip, birokrasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mesti fleksibel dengan keadaan, tidak boleh kaku dan statis (Hayat, 2018). Apalagi di era sekarang perubahan terjadi begitu cepat. Tak hanya soal kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, khususnya di kota-kota besar juga mengalami peningkatan. Kebijakan publik mesti terus dirumuskan kebaruannya, diimplementasikan pada masyarakat, dan tetap dievaluasi dengan seksama (Tachjan, 2006).

Penelitian tentang kebijakan publik di Surabaya telah banyak dilakukan. Di antaranya, berjudul *Implementasi Program Srikandi Baruna dalam rangka Mempromosikan Kesetaraan Gender pada Pelayanan Pub (Studi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya)* yang membahas tentang

para petugas pemadam kebakaran yang berjenis kelamin perempuan dan tak kalah sigap melayani masyarakat. Keberadaan mereka bisa makin menguatkan tim petugas lapangan karena mereka bisa dengan mudah memberikan penanganan pada kaum Ibu atau anak-anak. Khususnya, pada saat melakukan evakuasi (Sinaga, 2019). Ada pula penelitian berjudul *Implementasi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya* yang menyoroti efektifitas manajerial SDM di sana (Artasari & Rahaju, 2018).

Penelitian lain yang masih bersinggungan dengan kebijakan publik di Surabaya dan belakangan ini dipublikasikan adalah berjudul *Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window* yang mendeskripsikan tentang terobosan perizinan *online* yang telah berjalan sekitar satu dekade di sana (Rachman, 2022). Ada pula *Implementasi Kebijakan Inklusif Pondok Sosial Kalijudan Surabaya* yang memaparkan kinerja Dinas Sosial Surabaya dalam melayani anak berkebutuhan khusus (Rachman, 2020). Masih ada banyak publikasi lain mengenai inovasi publik di Surabaya. Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah Kota

Surabaya selalu punya perhatian pada kekonsistenan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, tidak salah bila ia menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan tujuan studi banding oleh pemerintah daerah lain.

Studi kali ini diharapkan bisa menambah khazanah riset mengenai DPKP. Selain itu, hasil kajian ini bisa pula menjadi wawasan bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), khususnya di DPKP Surabaya. Dinas ini memiliki satu sekretariat dan dua bidang, yakni, bidang pencegahan dan bidang pemadaman (Pemerintah Kota Surabaya, 2021). Hasil riset mengenai pencegahan dan pemadaman kebakaran bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan tupoksi di bidang-bidang tersebut. Dinas ini memiliki model pelayanan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Bila ada kebakaran maupun evakuasi penyelamatan, segenap petugas mesti bertatap muka dengan warga. Artinya, inovasi di perangkat daerah ini dipastikan langsung dapat dirasakan dampak sosialnya.

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya*, khususnya dalam lingkup dampak sosial yang

dihadirkan dari keberadaan inovasi tersebut. Teori yang dipakai dalam kajian ini adalah teori kebijakan publik yang dipopulerkan Hayat pada tahun 2018, di mana setiap kebijakan memiliki lingkaran tahapan: formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi. Pada saat memformulasikan, pihak eksekutif harus paham permasalahan yang ingin diatasi. Sehingga, implementasi yang dijalankan bisa tepat sasaran atau memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Tiap waktu, pengawasan dilakukan oleh pemegang pucuk pimpinan di pemerintah daerah, artinya, evaluasi dikerjakan secara berkelanjutan. Secara garis besar, melalui evaluasi terhadap kebijakan, bisa tampak seberapa besar dampak sosial dari program-program yang dijalankan. Nilai dari dampak itu pun dapat diformulasikan; negatif atau positif. Semua langkah pemerintah serta reformasi birokrasi di level daerah maupun pusat seharusnya punya dampak positif dan dapat dijalankan secara berkelanjutan (Hayat, 2018). Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Artikel ini mendeskripsikan implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di*

Surabaya dalam konteks dampak sosial yang dihasilkan di Surabaya.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah di level pusat maupun daerah, sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Apa pun yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan segenap warga, bisa dikategorikan sebagai kebijakan publik. Sebagai contoh, ada sebuah pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa tatkala ada banjir rob masuk ke jalan raya di salah satu kawasan pinggiran. Eksekutif yakin, seperti yang terjadi selama ini, banjir rob hanya lewat sebentar lalu menghilang. Sikap pemerintah yang tidak melakukan apa-apa tatkala ada banjir rob termasuk dalam kategori kebijakan publik. Demikian pula, saat pemerintah itu ternyata memilih untuk memasang rumah pompa di sekitar titik banjir rob. Hal itu juga termasuk dalam kategori kebijakan publik. Semua langkah pemerintah selalu punya konsekuensi dianggap sebagai kebijakan karena punya korelasi dengan kehidupan warga. Di era kekinian, kebijakan public bisa berupa hal yang terkait dengan perkembangan teknologi, bisa pula yang masih berbasis hal-hal

konvensional (Wahyuningsih & Rachman, 2021).

Kebijakan publik tidak boleh stagnan atau tidak luwes. Birokrasi mesti terus dievaluasi demi memberikan manfaat yang maksimal. Ia kerap punya perbedaan saat diaplikasikan di satu daerah, dan diaplikasikan di daerah lain. Alasannya, di dua daerah tersebut punya kultur, karakteristik, maupun letak geografis berbeda. Sehingga, interaksi masyarakat pun tidak sama. Oleh sebab itu, sebuah kebijakan dari pemerintah mesti bisa memperhatikan semua elemen masyarakat (Hayat, 2018). Ada beberapa tahapan dalam sebuah kebijakan publik, yakni, perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi (Tachjan, 2006).

Studi mengenai kebijakan publik setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk keperluan ilmiah demi menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan. Pasalnya, pemerintah merupakan pihak yang mengeksekusi sebuah kebijakan. Kedua, untuk keperluan profesional atau strategis. Artinya, kajian mengenai kebijakan publik dipakai sebagai bahan pertimbangan memecahkan solusi kongkret dari permasalahan yang ada di satu tempat. Tentu saja, ada perbedaan

masalah di satu kawasan dengan kawasan lain. Namun, mempelajari kebijakan di satu tempat dapat menjadi penambah wawasan untuk merumuskan kebijakan di tempat lain. Oleh karena itu, ada istilah replikasi, studi tiru, ataupun adopsi terhadap sebuah kebijakan. Ketiga, untuk keperluan politis. Dalam konteks ini, alasan politik berkenaan dengan tahapan evaluasi dari eksekutif. Pemerintah daerah wajib mempelajari kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu sebagai proses evaluatif (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebijakan public dirumuskan oleh eksekutif. Implementasinya pun dijalankan oleh pemerintah. Bisa jadi, pemerintah menggandeng eksponen di masyarakat. Pengawasan sebuah kebijakan dilaksanakan oleh legislatif atau dewan perwakilan rakyat setempat. Sedangkan evaluasi dilakukan bersama oleh eksekutif dan legislatif di meja dewan. Meski demikian, masyarakat bisa pula melakukan pengawasan dan evaluasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang bisa dilakukan antara lain melalui media massa, sementara evaluasi dapat pula menggunakan saluran aspirasi para anggota legislatif (Dunn, 1994).

Pada umumnya, sebuah kebijakan muncul karena ada suatu persoalan yang butuh solusi. Untuk mencari jalan keluar tersebut dibutuhkan deskripsi dari masalah tersebut secara komprehensif. Setelahnya, dilakukan prediksi dari akibat problem yang dimaksud. Efek-efek negatif tersebut bisa diketahui secara detail sehingga pada satu titik, dapat diformulasikan pula upaya-upaya yang bisa menanggulangnya dalam bentuk rekomendasi. Dari sana bisa dicetuskan sebuah kebijakan yang kemudian diimplementasikan. Implementasi itu mesti diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan, dalam periode tertentu, untuk melakukan pembenahan di masa datang (Anderson, 1984).

Implementasi kebijakan *Response Time 7 Menit Layanan Pemadam Kebakaran di Surabaya* dilakukan DPKP Surabaya selaku instansi eksekutif. Pengawasannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Surabaya. Evaluasinya dijalankan oleh DPKP dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya. Ada sejumlah riset yang punya beberapa kesamaan dengan kajian dalam artikel ini. Di antaranya, penelitian tentang *sistem E-kinerja di* suku Dinas Penanggulangan

Kebakaran Dan Penyelamatan Jakarta Utara. Pada riset dalam artikel jurnal tersebut, dipaparkan sebuah inovasi pada perangkat daerah yang menangani pemadaman kebakaran (Firman, 2019). Ada pula yang membahas implementasi program penanggulangan kebakaran dan evakuasi pemadaman kebakaran secara umum di Palembang (Nugraha et al., 2020). Persamaan kajian dalam artikel ini dengan dua riset tadi adalah karena membahas tentang perangkat daerah yang menangani evakuasi dan kebakaran. Khususnya, inovasi yang dicetuskan instansi tersebut. Perbedaannya, dalam artikel ini, objek kajian spesifik tentang inovasi *response time* 7 menit yang diimplementasikan di Surabaya.

Sejak tahun 2015, kebijakan publik di seluruh dunia diupayakan selaras dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang digariskan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ada tujuh belas poin SDGs, di mana tiap kebijakan setidaknya sesuai dengan salah satu poin tersebut. Lebih baik lagi, jika ternyata bisa mendukung lebih dari satu poin SDGs (United Nation, 2015). Tujuh belas SDGs yang dimaksud antara lain; *No Poverty* (memberantas kemiskinan), *Zero Hunger* (menghilangkan kelaparan), *Good*

Health and Well-Being (kehidupan yang sehat dan baik), *Quality Education* (pendidikan yang berkualitas), *Gender Equality* (menciptakan kesetaraan gender), *Clean Water and Sanitation* (merealisasikan air dan sanitasi yang bersih), *Affordable and Clean Energy* (terjangkaunya energi bersih), *Decent Work and Economic Growth* (pekerjaan yang layak dan ekonomi yang terus bertumbuh), *Industry, Inovation and Infrastructure* (berkembangnya industri, inovasi dan infrastruktur). Poin lainnya adalah *Reduced Inequalities* (upaya mengurangi kesenjangan), *Sustainable Cities and Communities* (terwujudnya kota dan pemukiman yang lestari berkelanjutan), *Responsible Consumption and Production* (proses konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), *Climate Action* (penanganan terhadap isu perubahan iklim), *Life Below Water* (kepedulian terhadap ekosistem di perairan), *Life on Land* (kepedulian terhadap ekosistem di daratan), *Peace, Justice, and Strong Institutions* (perdamaian, keadilan, dan terciptanya lembaga-lembaga yang Tangguh untuk menegakkannya) serta *Partnership for The Goals* (kemitraan atau kebersamaan untuk mencapai tujuan-tujuan luhur

pembangunan). Dari tujuh belas poin tersebut, dibagi lagi dalam empat pilar (Kementerian PPN/Bappenas, 2020), antara lain, pembangunan sosial (poin pertama hingga kelima), pembangunan ekonomi (poin ketujuh sampai kesepuluh dan ketujuh belas), pembangunan lingkungan (poin keenam, kesebelas, dan kelima belas), pembangunan hukum dan tata kelola (poin keenam belas).

Selama ini, telah banyak artikel ilmiah yang dipublikasikan dengan mengambil tema kebijakan di perkotaan atau kawasan padat penduduk dihubungkan dengan implementasi SDGs. Di antaranya, yang berjudul *Penanganan Kawasan Kumuh Di Beberapa Daerah Di Jawa Dan Sumatera*, di mana kawasan kumuh umumnya ada di perkotaan dengan salah satu kerentanannya adalah bencana kebakaran (Riawan, 2022). Artikel lain yang membahas tentang penataan kota dan potensi adanya bencana kebakaran serta hubungannya dengan SDGs berjudul *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement* yang mengambil lokasi penelitian di Surakarta, salah satu kota urban di Indonesia (Latif, 2020). Kajian kali ini bisa memberi manfaat teoritik maupun praktik dalam

pembahasan kebijakan publik di instansi yang menangani kebakaran, pada kota besar seperti Surabaya, ditambah penelidikan terhadap hubungannya dengan SDGs sebagai amanat resolusi PBB (Rachman & Marijan, 2021).

Dampak merupakan pengaruh sebagai akibat sebuah fenomena atau kondisi, ia bisa bersifat sebagai efek negatif maupun positif. Aktivitas yang dilakukan individu bisa memiliki dampak, terlebih, jika yang melakukan aktivitas adalah sebuah institusi pemerintah daerah dalam konteks kebijakan. Tentu saja, dampak sosial pada masyarakat akan dirasakan (Alya, 2009). Harapan dari semua kebijakan publik adalah terwujudnya dampak sosial positif atau muncul kebermanfaatan yang luas. Dengan demikian, anggaran yang dipakai untuk implementasi kebijakan tersebut bisa dirasakan secara optimal oleh warga. Studi mengenai dampak sosial dari sebuah kebijakan di level pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Di antaranya, tentang penataan Pedagang Kaki Lima di kota Batu, Jawa Timur. Dampak sosial yang terjadi tidak hanya terhadap para pedagang, namun juga di lingkup yang lebih besar, yakni para konsumen atau pelanggan yang sudah pasti termasuk warga setempat pula (Yusida et al.,

2019). Ada pula artikel mengenai dampak sosial dari kebijakan tata ruang di kabupaten Pandeglang. Oleh karena fokusnya tata ruang daerah, sudah pasti pula punya pengaruh pada warga di Pandeglang secara keseluruhan (Kusdiane et al., 2022). Studi tentang kebijakan *Response Time* 7 menit di DPKP Surabaya yang tertuang dalam artikel ini mengamati tentang strategi serta implementasi pemerintah daerah Surabaya untuk melayani segenap warga. Seperti diketahui, bencana kebakaran tidak pernah memilih-milih mangsa. Kadang kala, kebakaran terjadi di pemukiman kumuh, pusat perbelanjaan, perumahan elite, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, program ini menjadikan semua warga Surabaya tak terkecuali, sebagai pihak yang dilayani.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dilakukan pada Agustus 2022 atau setelah inovasi ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB pada Juli 2022. Fenomenologi sebagai sebuah metode dapat berfokus untuk mendeskripsikan fenomena berdasarkan pengalaman dan subjektivitas (Littlejohn & Foss, 2005).

Sejumlah kajian kebijakan publik menggunakan fenomenologi untuk melihat implementasi program dari pemerintah berdasarkan pengalaman warga sebagai sasaran dari inovasi yang dijalankan (Luqman et al., 2017). Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengamati kebijakan publik tentang *Response Time* 7 Menit yang dijalankan DPKP Surabaya secara langsung di Surabaya, mempelajari pernyataan-pernyataan Kepala DPKP Surabaya terkait detail inovasi ini sejak tahun 2019 di awal peluncuran program hingga tahun 2022 ini di media massa internal Pemerintah Kota Surabaya maupun di media massa lain, serta melakukan pengamatan pada kanal-kanal berita sehubungan dengan topik tersebut. Kajian literatur, baik dari data yang dimiliki oleh DPKP Surabaya, buku-buku maupun artikel jurnal dengan tema seputar kebijakan publik dan dampak sosial turut dilakukan sebagai penguat demi memberikan referensi aktual terhadap pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Response Time* 7 menit yang dicetuskan DPKP Surabaya merupakan upaya memperingkas waktu tanggap darurat oleh petugas. Inovasi ini tercatat dimulai pada 2019 atau di era

kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Hingga saat ini, di era kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, kebijakan ini tetap dipertahankan bahkan dikembangkan agar bisa makin optimal. Wali Kota Eri Cahyadi memiliki perhatian khusus pada pelayanan pemadaman kebakaran karena sebagai kota dengan kepadatan bangunan yang ketat, kebakaran di satu titik bisa dengan mudah merembet ke lokasi lain. Di mana hal itu potensial menambah jumlah korban jiwa maupun harta. Dalam rentang lima tahun atau 2017-2021, tren jumlah kebakaran bangunan di kota yang relatif padat ini mengalami penurunan. Pada 2017, terdapat 159 kebakaran bangunan, demikian pula pada 2018, terdapat 159 bangunan terbakar. Pada 2019, terdapat kenaikan, yakni, 164 jumlah kebakaran bangunan. Namun, setelah inovasi ini dijalankan, data menunjukkan kalau kebakaran di tahun 2020 di angka 148 bangunan, dan kembali menurun pada 2021 di angka 112 bangunan.

Salah satu kasus kebakaran yang menyita perhatian publik terjadi pada 13 April 2022. Saat itu, pusat perbelanjaan terbesar dan tertua di Surabaya, Tunjungan Plaza mengalami kebakaran. Oleh karena para petugas maupun

sarana/prasarana yang dimiliki DPKP tergolong prima, petugas sampai di lokasi kejadian lima menit setelah laporan diterima. Laporan diterima pada 17.37, petugas tiba di lokasi pada 17.42. Dampaknya, korban materi bisa diminimalkan serta perluasan lokasi kebakaran dapat dicegah.

Response time di rentang 2019 (5,3 menit) hingga 2021 (5,07 menit) memiliki durasi rata-rata yang memuaskan atau di bawah tujuh menit. Meski pada 2019, masih ada 13 persen *response time* di atas tujuh menit. Pada 2021, sudah tidak ada sama sekali *response time* di atas tujuh menit. Oleh karena *response time* petugas makin cepat, perluasan lokasi kebakaran bisa dicegah. Hal itu bisa disaksikan melalui data durasi pemadaman titik-titik kebakaran. Sebagai ilustrasi, pada 2018 atau sebelum inovasi ini dijalankan, rata-rata proses pemadaman di tahun 2018 adalah 61.45 menit, menjadi lebih cepat pada 2019 (54,87 menit), 2020 (48,40 menit), dan 2021 (41,99 menit). Saat ini, DPKP Surabaya memiliki tak kurang dari 31 pos pemadam kebakaran dengan unit atau armada pemadaman berjumlah delapan puluh enam. Sumur atau tandon aktif khusus pemadaman kebakaran yang siap dioperasikan dan tersebar di 31

kecamatan di Surabaya berjumlah 391 buah. Petugas pemadam kebakaran berjumlah 678 personel. Armada dan SDM itu memiliki peran penting dalam keberlangsungan inovasi ini.

Walaupun dicatat secara resmi sejak 2019, sejatinya, upaya perencanaan dan persiapan sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Menurut data dari DPKP, pada 2016 jumlah bangunan rayon (kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan) dan pos pembantu tersebar di 27 lokasi dengan unit pemadaman berjumlah lima puluh empat. Sedangkan pada 2019, sudah ada 31 lokasi dengan unit pemadaman berjumlah delapan puluh enam. Hingga Maret 2022, DPKP Surabaya didukung oleh 803 pegawai aktif, di mana 678 di antaranya adalah pasukan pemadam kebakaran. Di tingkat nasional, dikenal konsep Wilayah Manajemen Kebakaran atau WMK. Di tahun 2016, WMK Surabaya berada di posisi 78,8 persen. Sementara di tahun 2019, sudah mencapai 84 persen (DPKP Surabaya, 2021). Dengan kata lain, proses memformulasikan kebijakan *Response Time* 7 menit telah berjalan sebelum implementasi program. Dalam sejumlah teori perumusan kebijakan yang dipopulerkan para pemikir ilmu sosial, dikenal jenjang

manajemen kebijakan. Biasanya, ia berawal dari pendeskripsian isu atau problem, realisasi model agenda kebijakan, peluncuran kebijakan di ruang publik, serta memastikan sistem pengaturan/pengelolaan kebijakan beroperasi dengan baik. Pengelolaan kebijakan ini setidaknya terdiri dari teknis implementasi, evaluasi, serta reformasi bila memang dibutuhkan (Parsons, 1996).

Durasi tujuh menit respon tanggap dihitung sejak laporan diterima oleh DPKP sampai dengan petugas sampai di lokasi kejadian. Ada pun laporan itu diterima melalui *call center* 112 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai kanal kegawatdaruratan. Angka tujuh menit tersebut sudah melampaui target di level nasional: lima belas menit. Apa yang dilakukan oleh DPKP Surabaya merupakan upaya menjawab tantangan zaman. Di era sekarang, Surabaya tidak hanya tergolong kawasan padat penduduk dan bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan pribadi di daerah ini mencapai 2.126.168. Volume kendaraan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dinas Perhubungan Surabaya melansir, survei data *VC ratio* menunjukkan angka 0,6 yang berarti kepadatan lalu lintas di kota ini

relatif tinggi, meski masih bisa menampung kendaraan-kendaraan yang lewat. Oleh sebab itu, perlu inovasi dan komitmen agar pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan bisa berjalan secara memuaskan. Bagaimana pun juga, layanan DPKP Surabaya merupakan protokol tanggap darurat yang menjadikan jalan raya sebagai sarana utama.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan sejumlah regulasi pendukung program inovasi ini. Di antaranya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pada Perda anggaran tersebut, tercantum anggaran untuk penguatan pelayanan masyarakat khususnya di aspek urusan kebakaran dan penyelamatan. Dikeluarkan pula Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/104/436.1.2/2014 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya. Keputusan wali kota itu menjadi dasar hukum sinergitas di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun dengan jajaran samping seperti kepolisian dan TNI. Di samping

itu, untuk memperkuat kekompakan dan kerja sama tim, Kepala DPKP mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 188.45/4428/436.7.6/2019 tentang *Response Time* 7 menit dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/4429/436.7.6/2019 serta SOP (Standar Operasional Prosedur) Nomor 060/4230/436.7.6/2019 untuk para personel yang tergabung sebagai pelaksana tugas ini.

Kolaborasi dan sinergitas dilakukan dalam proses implementasi kebijakan baik dengan pihak di internal maupun eksternal Pemerintah Kota Surabaya (Diskominfo Jatim, 2018). Selain DPKP, keberhasilan inovasi ini tidak lepas dari kesigapan petugas di *call center* 112 kegawatdaruratan yang dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Surabaya. Pada waktu petugas dengan unit-unitnya melakukan pergerakan dari kantor rayon maupun pos pembantu, di jalan raya, petugas Dinas Perhubungan mengkondisikan perlintasan lampu merah. Tujuannya, di jalur yang dipakai oleh pemadam kebakaran akan “dihijaukan” demi kelancaran petugas sampai di lokasi. Tentu saja, aparat kepolisian turut melakukan pengaturan lalu lintas. Di lokasi kejadian, Satpol PP, Bakesbang

Linmas, serta TNI melakukan penjagaan keamanan. Pasca evakuasi, petugas dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan akan menjalankan pendataan sehubungan dengan apa saja yang bisa dibantu Pemerintah Kota Surabaya untuk para korban.

Inovasi ini didukung penuh oleh sarana/prasarana serta SDM. Per Maret 2022, ada 31 pos pemadam kebakaran dengan unit atau armada pemadaman berjumlah delapan puluh enam. SDM berjumlah 803 pegawai aktif, di mana 678 di antaranya adalah pasukan pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan. Pengadaan sarana/prasarana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Surabaya. Sementara SDM berasal dari internal DPKP. Kepala DPKP Surabaya Dedik Irianto dalam wawancara yang dilakukan pada 1 April 2022 menyatakan, ada beberapa pihak yang menjadi mitra DPKP dalam hal penguatan kompetensi atau kapabilitas SDM. Para petugas lapangan secara rutin setidaknya enam bulan sekali melakukan latihan bersama Basarnas Jawa Timur maupun TNI Angkatan Laut. DPKP juga bermitra dengan *Pusat Kebugaran dan Olahraga Kinetik-X* sebagai konsultan *body performance*

bagi personel. Apa yang dilakukan DPKP menunjukkan keseriusan dalam hal menjaga stabilitas dan pemantapan petugas lapangan.

Formulasi, Implementasi, Evaluasi dan Reformasi

Teori kebijakan publik yang dicetuskan Hayat dalam buku *Kebijakan Publik, Evaluasi Reformasi Formulasi* menyatakan ada empat poin penting dalam penerapan sebuah kebijakan atau inovasi. Di antaranya, formulasi, implementasi, evaluasi dan reformasi. Dalam konteks kebijakan response time 7 menit DPKP Surabaya, formulasi atau perumusan telah dilakukan setidaknya pada 2016 atau tiga tahun sebelum inovasi ini resmi diluncurkan pada 15 November 2019. Di tahap formulasi itu, ada arahan langsung dari Wali Kota Tri Rismaharini yang dieksekusi secara berkesinambungan hingga saat program ini kali pertama dirilis. Di saat perencanaan dan perancangan itu, dideskripsikan problem lapangan yang ada di satu kawasan. Setelahnya, dipastikan inovasi yang tepat sasaran. Dalam konteks Surabaya, problem kepadatan penduduk, bangunan, dan arus lalu lintas, punya dampak pada penanganan kebakaran dan kegawatdaruratan. Oleh sebab itu, inovasi berkenaan dengan layanan publik kegawatdaruratan, khususnya

kebakaran dan penyelamatan/evakuasi, sudah seharusnya menjadi perhatian.

Pada tahap implementasi, para petugas dari DPKP Surabaya menjadi *leading sector* pelaksana lapangan. Meski demikian, mereka tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan pihak-pihak lain di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun jajaran samping. Artinya, implementasi dari program ini membutuhkan sinergitas dan mesti mengesampingkan ego sektoral. Hal itu dikarenakan tugas pemadaman kebakaran dan evakuasi tidak hanya soal bagaimana menghadapi (pemadaman) dan menghindari (evakuasi) semburan api. Lebih dari itu, ada momen pra aktifitas utama maupun pasca aktifitas utama. Maksudnya, pada momen pra aktifitas utama, jalur menuju lokasi kebakaran mesti sudah lebih dahulu disterilkan atau dilancarkan demi membuat respon cepat tanggap seoptimal mungkin. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh DPKP, melainkan butuh pihak lain seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pengamanan lokasi di saat aktifitas utama pelayanan (pemadaman dan evakuasi) juga membutuhkan pihak-pihak lain seperti Satpol PP, Bakesbang Linmas dan TNI. Ada pun

pada momen pasca aktifitas utama diperlukan pemulihan trauma bagi para korban, yang semua itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh DPKP. Maka dari itu, dibutuhkan pihak-pihak seperti Dinas Sosial (penyediaan kebutuhan material maupun mental korban) dan Dinas Pendidikan (mengingat dalam banyak kasus kebakaran seragam, peralatan, bahkan raport sekolah ikut hangus).

Di tahap evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap program *response time* 7 menit dilakukan berjenjang. Para petugas lapangan dipantau dan diawasi oleh kepala dinas. Sementara kinerja kepala dinas selalu mendapat pantauan dari Wali Kota Surabaya. Evaluasi tidak hanya dilakukan tiap tahun. Tiap selesai melakukan tugas pemadaman, kepala dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja para petugas lapangan. Wali Kota Surabaya dikenal terbuka pula dengan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat. Tiap Sabtu, Wali Kota Eri Cahyadi membuka balai kota sebagai tempat mencurahkan isi hati atau klinik aduan pelayanan publik. Dapat dikatakan, warga Surabaya punya akses untuk memberikan evaluasi pada tiap layanan publik, termasuk yang dilaksanakan oleh DPKP. Sementara itu, oleh karena anggaran

yang dipakai untuk pelaksanaan program adalah APBD tahunan, otomatis para anggota DPRD Surabaya punya hak pula untuk mengawasi.

Di tahap reformasi, Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan *response time* 7 menit yang sudah ada sebelum yang bersangkutan mulai menjabat pada 2021. Pada era kepemimpinan Eri Cahyadi pula pembentukan relawan pemadam kebakaran dimantapkan agar tugas-tugas pemadaman menjadi lebih cepat. Pada 1 Maret 2022, Wali Kota Eri Cahyadi mengukuhkan 154 Kader Madagaskar atau Masyarakat dan Keluarga Siaga Kebakaran. Anggaran untuk penambahan sarana/prasarana juga terus digelontorkan. Kesenambungan program yang sudah terbukti memiliki nilai manfaat bagi masyarakat ini terus dipertahankan (Hakim, 2022).

Berdasarkan Perwali Surabaya 66/2022, pada tahun ini anggaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran mendapai Rp 69, 96 miliar. Sementara anggaran pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri diplot senilai Rp 27 miliar. Ada pun

program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dianggarkan menelan biaya Rp 538 juta (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Apabila ditelaah memakai pilar pembangunan dalam SDGs, kebijakan *response time* 7 menit selaras dengan semua pilar pembangunan berkelanjutan. Pada pilar sosial, kebijakan sesuai dengan semangat menghapus kemiskinan, mewujudkan kehidupan sejahtera, dan memberikan pendidikan berkualitas. Ilustrasinya, saat kebakaran segera dipadamkan, kerugian materi maupun non-materi bisa diminimalkan. Dengan kata lain, potensi kemiskinan melanda para korban kebakaran bisa diminimalkan. Mereka pun bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Kehadiran Dinas Pendidikan pasca kebakaran untuk membantu para korban usia sekolah adalah bentuk nyata upaya menjaga layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Khususnya, bagi korban kebakaran, jangan sampai mereka ketinggalan sekolah dengan alasan tidak punya seragam, peralatan, atau buku raport yang hangus jadi abu.

Inovasi yang digagas oleh DPKP Surabaya ini punya keselarasan dengan pilar pembangunan ekonomi

berkelanjutan. Percepatan waktu tanggap darurat penanganan kebakaran bisa memperkecil kemungkinan korban material. Dengan kata lain, potensi makin menjauhnya kesenjangan atau disparitas sosial akibat bencana kebakaran bisa ditekan seminimal mungkin. Apalagi, intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ikut meringankan beban para korban. Response time 7 menit menunjukkan keseriusan instansi-instansi plat merah untuk bersinergi atau bermitra. Ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, kepolisian, dan TNI dalam kerja penanganan bencana kebakaran. Tujuannya tentu menjaga kesejahteraan warga Surabaya. Selain itu, ada pula keselarasannya dengan pilar pembangunan lingkungan dalam hal pemeliharaan ekosistem di darat. Logikanya, jika kebakaran segera bisa dipadamkan, polusi udara akibat asap dapat ditekan seoptimal mungkin. Upaya mengurangi polusi udara adalah salah satu bentuk kepedulian pada isu perubahan iklim. Udara yang memiliki tingkat polusi rendah akan berdampak pada kenyamanan lingkungan. Sehingga, keberlanjutan kota dan komunitasnya lebih terjamin. Selain itu, ada pula keselarasannya dengan pilar pembangunan lingkungan dalam hal pemeliharaan

ekosistem di darat. Logikanya, jika kebakaran segera bisa dipadamkan, polusi udara akibat asap dapat ditekan seoptimal mungkin. Upaya mengurangi polusi udara adalah salah satu bentuk kepedulian ada isu perubahan iklim. Udara yang memiliki tingkat polusi rendah akan berdampak pada kenyamanan lingkungan. Sehingga, keberlanjutan kota dan komunitasnya lebih terjamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan publik *Response Time* 7 Menit yang dilakukan DPKP Surabaya diterapkan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur teoritik yang digariskan para pakar. Pertama, tahap formulasi atau perumusan yang dilakukan eksekutif berdasarkan masalah serta fenomena perkotaan sehubungan dengan potensi bencana kebakaran. Kedua, tahap implementasi atau pelaksanaan program. Ketiga, tahap evaluasi yang tidak hanya melibatkan internal pemerintah daerah, namun juga membuka kran aspirasi bagi masyarakat di media sosial maupun diskusi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, tahap reformasi atau pembenahan-pembenahan inovasi ke arah yang lebih baik. Pada tahap implementasi, sebagai tahap utama dari penerapan

kebijakan ini, pemerintah daerah melakukan deskripsi persoalan dan solusi yang diambil, prediksi tentang apa yang kemudian akan terjadi, rekomendasi atau inisiatif-inisiatif sehubungan dengan tantangan yang ada, pemantauan/pengawasan berkelanjutan oleh semua penanggungjawab teknis demi kelancaran program, serta evaluasi yang dilakukan komandan lapangan maupun kepala dinas tiap sesudah menjalankan tugas pemadaman maupun penyelamatan. Kebijakan *Response Time* 7 Menit ini bisa dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat karena sasarannya adalah seluruh warga tanpa sekat golongan/kelompok tertentu, dan selaras pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang diresolusikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alya, Q. (2009). *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*. PT Indahjaya Adipratama.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Artasari, N. W. Y., & Rahaju, T. (2018). Implementasi Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. *Publika*, 6(9).
- Diskominfo Jatim. (2018). *Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya Buat Terobosan Baru Tingkatkan Layanan Masyarakat*. Diskominfo Jatim. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dinas-pemadam-kebakaran-surabaya-buat-terobosan-baru-tingkatkan-layanan-masyarakat>
- DPKP Surabaya. (2021). *Renstra 2021-2026*. [https://bappeko.surabaya.go.id/renga/uploaded/bab/2500/babl-renstra2_final/BAB_I_Renstra_PMK_2021-2026_\(Final\)_revisi_281220211.pdf](https://bappeko.surabaya.go.id/renga/uploaded/bab/2500/babl-renstra2_final/BAB_I_Renstra_PMK_2021-2026_(Final)_revisi_281220211.pdf)
- Dunn, W. N. (1994). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Firman. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem E-Kinerja Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal Of Government*, 4(2), 132–155.
- Hakim, A. (2022). *Sebanyak 154 kader “Madagaskar” Surabaya dikukuhkan*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/580449/sebanyak-154-kader-madagaskar-surabaya-dikukuhkan>
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi Reformasi Formulasi*. Setara Press.
- KemenPAN-RB. (2022). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 289/2022 Tentang Top inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD tahun 2022*. <https://jdih.menpan.go.id/puu-1526-Keputusan-Menpan.html>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020).

- Metadata Indikator. SDGS Bappenas.*
<https://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>
- Kusdiane, S. D., Sjafari, A., & Amiruddin, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Terhadap Sektor Pertanian. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 315–323.
- Latif, M. B. (2020). *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Littlejohn, S., & Foss, K. (2005). *Theories of Human Communication*. Thomson Wadsworth.
- Luqman, Y., Sumardjo, S., Sarwoprasodjo, S., & Tambunan, A. H. (2017). Solusi Menuju Konvergensi Arah Komunikasi Kebijakan Publik dalam Rangka Antisipasi Krisis Energi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 134. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i2.2161>
- Mukaromah, H. (2022). Pro Kontra Terhadap Kebijakan Tata Kota Pengembangan Hunian Vertikal Di Surabaya. *Jurnal Jebaku: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1–11.
- Nugraha, S. A., Febriyanti, D., & Kencana, N. (2020). Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2).
- Nuraini, F. (2022). *Walang Kadung-Roti 7 Lapis DPKP Surabaya Masuk Top 45 Inovasi Layanan Terbaik Nasional*. Surabaya.Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2022/08/01/walang-kadung-roti-7-lapis-dpkp-surabaya-masuk-top-45-inovasi-layanan-terbaik-nasional>
- Parsons, W. (1996). *Public Policy*. Edward Elgar.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). *Peraturan Wali Kota Surabaya 74/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya*. https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2021/12/62957/5._DINAS_PEMADAM_KEBAKARAN_DAN_PENYELAMATAN.pdf?1640741810
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Perwali Surabaya 66/2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022*. https://bappeko.surabaya.go.id/images/%23Perwali_66_2022_Perubahan_RKPD_2022.pdf
- Rachman, R. F. (2020). Implementasi Kebijakan Inklusif Pondok Sosial Kalijudan Surabaya. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(1), 673–691. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.53>
- Rachman, R. F. (2022). Optimalisasi Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Inovasi Surabaya Single Window. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 6(2), 1428–1441. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v6i2.161>
- Rachman, R. F., & Marijan, K. (2021). Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. *Inovasi*, 18(103–111).

- Riawan, W. A. (2022). Penanganan Kawasan Kumuh Di Beberapa Daerah Di Jawa Dan Sumatera. *Jurnal Pelita Kota*, 3(2), 245–278.
- Sinaga, Y. (2019). *Implementasi Program Srikandi Baruna dalam Rangka Mempromosikan Kesetaraan Gender pada Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya.
- Subakir, H., & Amal, A. S. (2022). Analisa Simpang Berdasarkan Kondisi Lingkungan yang Menyebabkan Antrian Panjang. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1), 75–85.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- United Nation. (2015). *About the Sustainable Development Goals*. [Www.Un.Org. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/](https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
- Wahyuningsih, M. E., & Rachman, R. F. (2021). Penyebaran Konten Lokal di Grup Facebook Penggemar Perpusda Lumajang, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(3), 1190–1209.
- Yusida, E., Utomo, S. H., & Qurrata, V. A. Q. A. (2019). Kebijakan publik dan dampaknya terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL). *Transaksi*, 11(1), 44–50.

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAMBI

Analysis of the Effect of Human Development Index and Provincial Minimum Wage on Open Unemployment Rate in Jambi Province

Amrizal*, Irmanelly**

Universitas Muhammadiyah Jambi, amrizal.tp@gmail.com*, 73irmaneli@gmail.com**

Diterima : 14 September 2022; Direvisi : 16 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.176>

Abstract

This study aims to examine the effect of the Human Development Index and the Provincial Minimum Wage on the Open Unemployment Rate in Jambi Province. The human index and the minimum wage fluctuate and increase every year. this can contribute to economic growth, where the two components can suppress the growth rate proclaimed in Jambi Province. The data used in this study is secondary data with analytical methods using various quantitative analysis techniques and hypothesis testing. The results of data analysis of the relationship between human index and tree stands in Jambi Province where the floor axis coefficient is positive, the correlation between the two variables is high human development index, high open tree level. These results indicate that the human development index variable with the open tree level is not significant. While the relationship between the provincial minimum wage and the open floor where it is reported that there is a negative correlation between floors, then the correlation between the two variables is not in the same direction as the floor if the minimum wage for the open floor is low. These results indicate that the provincial minimum wage with exposed tree floors is significant.

Keyword : Human Development Index, Provincial Minimum Wage and Open Unemployment Rate.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi. Indeks Pembangunan Manusia dan upah minimum berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana kedua komponen tersebut dapat berkontribusi mengurangi angka pengangguran yang dinyatakan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis menggunakan beberapa teknik analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi dimana koefisien korelasi Tingkat Pengangguran Terbuka dinyatakan positif, korelasi kedua variabel searah berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang tidak signifikan. Sedangkan hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dimana koefisien korelasi Tingkat Pengangguran Terbuka yang dilaporkan bernilai negatif, maka korelasi antara kedua variabel tidak searah yang artinya jika Upah Minimum Provinsi tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

PENDUHLUAN

Pengangguran merupakan masalah pembangunan terkini yang serius dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, dan termasuk masalah lama di semua negara terutama negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang secara langsung mempengaruhi manusia dan merupakan masalah yang paling serius. Tidak heran pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam debat politik. Oleh karena itu politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka ajukan akan membantu menciptakan lapangan kerja yang baru (Satriawan et al., 2020)

Dalam hal ini, negara berkembang tidak mampu menyelesaikan masalah ini dengan memberikan tunjangan kepada warga yang tidak bekerja, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan tersebut, (Marhaeni & Sirait, 2013). Masalah pengangguran ini bukan masalah baru yang juga ditemukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jambi. Istilah pengangguran terjadi ketika seseorang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha

mencari pekerjaan yang layak (Isnaini & Lestari, 2016). Pengangguran terbuka seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun yang akan menimbulkan masalah sosial lainnya (Amalia, 2014).

Menurut Sukirno, S (2013) pengangguran terbuka adalah pengangguran ini timbul sebagai akibat bertambahnya lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan angkatan kerja. akibatnya dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Efek dari situasi ini dalam waktu yang lama mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Oleh karena itu mereka menganggur secara nyata dan penuh waktu, dan oleh karena itu namanya dinyatakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka juga dapat disebabkan oleh penurunan kapasitas ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan atau penurunan perkembangan suatu industri.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang menghadapi masalah sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi. Masalah ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, yang membuat sulitnya memperoleh

pekerjaan di sektor industri. Perkembangan penduduk Provinsi Jambi terus berlanjut, untuk itu perluasan kesempatan kerja harus sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Pemerintah harus mengatasi masalah ini, jika perluasan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk maka semakin tinggi angka pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa perkembangan angkatan kerja, pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuatif (Badan Pusat statistik Provinsi Jambi, 2021). Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,87 % dan penurunan pada tahun 2018 sebesar 3,86 %. Terakhir tahun 2019 pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan kembali sebesar 4,19 %. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan partisipasi masyarakatnya dengan sumber daya yang ada harus mampu memaknai kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2004).

Salah satu indikator untuk melihat kualitas dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia.

IPM menjadi acuan bagi pembangunan suatu daerah, suatu daerah memiliki nilai IPM yang tinggi, otomatis kualitas kehidupan penduduk di daerah tersebut tinggi.

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi terhadap dasar manusia : umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan kesehatan diwakili oleh indeks harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indeks harapan lama pendidikan dan rata-rata lama pendidikan, (Badan Pusat statistik, 2021).

Sementara Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebesar 69,99 % dan peningkatan tahun 2018 sebesar 70,65 %. Dan mengalami peningkatan kembali tahun 2019 sebesar 71,26 %. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021).

Upah Minimum merupakan salah satu indikator untuk mengatasi pengangguran. Meskipun para pendukung upah minimum sering mengakui bahwa kebijakan tersebut menyebabkan pengangguran bagi sebagian kerja, tetapi mereka berpendapat untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya (Mankiw, 2003). Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 8,25 % dan peningkatan tahun 2018 sebesar 8,71 %. Untuk tahun 2019 terjadi penurunan lagi hingga 6,97 %. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2021).

Kedua komponen ini, Indeks Pembangunan Manusia dan UPM berdasarkan data dari BPS keduanya mengalami jumlah yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Ini bisa Menjadi peningkatan kecil, sedang bahkan besar tergantung pada kondisi tahunnya. Dengan kondisi di atas peningkatan ini dapat mempengaruhi pada kemajuan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kedua faktor ini akan membantu menurunkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Dalam studi ini kami mencoba untuk merumuskan bagaimana hubungan dan dampak Indeks Pembangunan Manusia dan upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Dengan tujuan untuk mengetahui hasil analisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

LANDASAN TEORI

Menurut (BPS, 2019), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).

Keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya, individu yang mengalami masalah tersebut di sebut pengangguran. Apabila penganggur tidak mempunyai pekerjaan sama sekali keadaan seperti ini dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, (Sadono sukirno, *makro ekonomi*, 2014)

Pada bagian ini Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, (Sayifullah & Gandasari, 2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan indikator komposit dalam perhitungannya, termasuk angka harapan hidup, pendidikan dan peningkatan di sektor kesehatan dan konsumsi. pendidikan dan pendapatan berkontribusi pada pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas penduduk disuatu wilayah maka semakin rendah tingkat

pengangguran di wilayah tersebut. Menurut (Mahroji & Nurkhasanah, 2019) peningkatan daya beli masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap dipasar tenaga kerja yang pada akhirnya pengangguran dapat dikurangi.

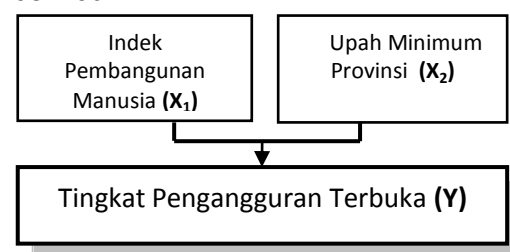
Korelasi antara Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan upah merupakan pendapatan pekerja yang memberikan jasanya kepada perusahaan (Prawira, 2018). Bagi perusahaan upah adalah salah satu biaya untuk membayar pekerja untuk input produksi yang disediakan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. semakin tinggi upah pekerja akan menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran . Oleh karena itu keputusan upah harus disesuaikan dengan hasil kinerja yang dihasilkan. Sebaliknya jika upah ditetapkan terlalu rendah yang diterapkan oleh suatu unit usaha sedangkan pekerja sangat produktif maka hal tersebut sudah pasti akan membuat mencari unit usaha yang memberi upah yang lebih tinggi atau lebih sesuai dengan produktivitas

kinerja yang telah dihasilkan pekerja tersebut.

Pekerja adalah setiap orang yang bersedia bekerja disuatu negara. Kelompok ini biasanya disebut kelompok usia produktif. Dari seluruh pekerja dalam suatu negara tidak semuanya mendapat kesempatan kerja. Beberapa dari mereka ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi masih banyak pengangguran terdidik dengan total 5,25 % merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga faktor-faktor yang mendorong produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia .

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dapat dilakukan dan dirasakan masyarakat adalah kenaikan upah minimum tahunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran di masyarakat Provinsi Jambi. Secara skematis kerangka pemikiran di atas dapat ditulis sebagai berikut :



Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis ada dugaan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial atau simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Metodologi survei yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, literature, studi pustaka dan sumber yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian dan data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti, seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data secara berkala (time series) dari tahun 2003 sampai dengan 2019, yang meliputi data: data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2003 sampai dengan 2019, data Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi tahun 2003 sampai dengan 2019, data Upah

Minimum Provinsi di Provinsi Jambi tahun 2003 sampai dengan 2019.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi linear berganda sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal dalam suatu model regresi. Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. heteroksedisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi memiliki ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. dan autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu

Analisis kuantitatif dengan korelasi

Menurut (Santoso & Madiistriyatno, 2021) studi korelasi adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang menentukan derajat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa mengubah, menambah atau manipulasi data yang sudah ada. Dalam penelitian

ini penulis menguji hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia dan Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi melalui metode statistika korelasi pearson menggunakan sistem yang digunakan dalam aplikasi SPSS.

Analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan kedua tentang dampak indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder selama periode 2003 sampai dengan 2019. Sistem yang digunakan dalam masalah ini menggunakan aplikasi Eviews sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka
- X_1 = Jumlah Indeks Pembangunan Manusia
- X_2 = Jumlah Upah Minimum Provinsi
- E = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- e = Error term

Analisis koefisien determinasi (R^2), Uji simultan (Uji F) dan Uji parsial (Uji t)

Analisis koefisien determinan dilakukan untuk mengetahui kontribusi besarnya pengaruh dari variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan dampak Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. (Amrizal, 2022)

Semakin besar R^2 maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama (Simultan) pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. bisa dilihat langsung dari nilai Prob (F-Statistics) yang merupakan tingkat signifikan dari nilai F, artinya untuk menilai pengaruh simultan variabel independent terhadap variabel dependent apakah bermakna secara statistik atau tidak. Uji-t adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Output uji-t pada EViews dapat dilihat di t-Statistic dan Prob. membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi atau α (0,05). Masalah pengambilan keputusan *Prob.* adalah sebagai berikut: Jika *Prob.* > α , maka

H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika $Prob. < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Hasil Dan Pembahasan

Pengangguran terbuka dapat terjadi sebagai akibat dari penurunan aktivitas ekonomi atau kemajuan teknologi yang mengurangi input tenaga kerja.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka upaya yang dapat dilakukan dan dirasakan masyarakat adalah peningkatan upah minimum setiap tahunnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat Provinsi Jambi.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi.

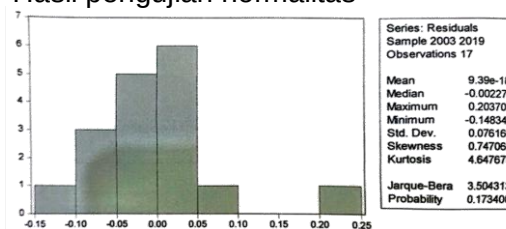
Dalam pembahasan ini, pertanyaan pertama tentang hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan upah minimum membahas tentang Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi periode 2003 sampai dengan 2019 dengan menggunakan analisis korelasi dijelaskan di bawah ini.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan sistem Eviews untuk menguji apakah

data berdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil dan penjelasannya

Hasil pengujian normalitas



Dari hasil gambar diatas dapat kita lihat bahwa nilai probability sebesar $0.173400 > 0.05$ (lebih besar dari $\beta 0.05$) dalam hal ini model di atas berdistribusi normal dan tidak memiliki gejala normalitas

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan salah satu model asumsi klasik yang mempertimbangkan hubungan antara variabel bebas. Untuk uji multikolinearitas digunakan sistem Eviews untuk menguji uji variance inflation factors (VIP). skor VIF lebih besar dari 10 merupakan indikasi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dan penjelasan :

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Unicentered VIF	Centered VIF
C	9.927953	25460.03	NA
IPM	2.717500	23655.56	1.027260
UMP	0.006364	589.7280	1.027260

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 8

Dari tabel diatas menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai VIF sebesar 1.027260 dan upah minimum sebesar 1.027260, dan nilai VIF tersebut kurang dari 10

sehingga tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dari asumsi klasik. Masalah heterokedastisitas biasanya hanya terjadi pada model yang menggunakan data pengamatan dari banyak objek atau cross section. Namun penelitian yang menggunakan data time series tetap harus melakukan uji heterokedastisitas, berikut hasil dan penjelasannya

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	0.536663	Prob. F(4,12)	0.7117
Obs*R-squared	2.579629	Prob. Chi-Square(4)	0.6304
Scaled explained SS	3.190817	Prob. Chi-Square(4)	0.5264

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 8

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa probabilita Chi-Square lebih besar dari nilai β_0 yang dipilih yaitu sebesar 0.6304 artinya tidak ada di temukan masalah heterokedastisitas atau terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

Hasil pada tabel diperoleh berdasarkan data yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS ,yang bertujuan untuk menguji hubungan antara Indeks Pembangunan

Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka maka di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Correlations

		Log IPM	
Log IPM	Pearson Correlation	1	.322
	Sig. (2-tailed)		.208
	N	17	17
Log TPT	Pearson Correlation	.322	1
	Sig. (2-tailed)	.208	
	N	17	17

Sumber : Data diolah dengan Software SPSS

Berdasarkan hasil analisis, koefisien korelasi untuk Tingkat Pengangguran Terbuka senilai positif yaitu sebesar 0,322 maka korelasi kedua variabel bersifat searah dengan kategori rendah dengan nilai koefisien diantara 0,20 – 0,399 artinya jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi juga tinggi. Namun dengan melihat dari tingkat signifikansi (Sig 2-tailed) pada rentang 0,208 > 0,05 maka bearti hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi positif tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan situasi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki etos kerja yang rendah meskipun tingkat pendidikan maupun kesehatan yang dilihat dari indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan akan berdampak terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran

Terbuka di Provinsi Jambi dengan peningkatan yang relatif rendah

Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

Berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan aplikasi software SPSS yang dirancang untuk menguji hubungan antara Upah Minimum Provinsi Jambi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil analisis Menunjukkan bahwa koefisien korelasi untuk pengangguran terbuka adalah negatif yaitu sebesar 0,760 artinya hubungan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Jambi adalah 76,00 persen.

Tabel 4. Correlations

		Log IPM	
Log UMP	Pearson	1	-.760
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		
	N		
Log TPT	Pearson	-.760	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		
	N		

Sumber : Data diolah dengan Software SPSS

Korelasi antara kedua variabel tersebut tidak searah atau negatif dengan 0,760 untuk kategori kuat. Ini karena nilai koefisiennya diantara 0,60 0,799. Namun dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi (Sig 2-tailed) yang berada dikisaran $0,000 < 0,005$ menunjukkan hubungan

negatif dan signifikan antara variabel Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

Upah minimum yang lebih tinggi dapat memperluas tenaga kerja. Hal ini karena upah yang lebih tinggi akan mendorong orang untuk mendaftarkan diri untuk pekerjaan, sehingga jumlah penawaran tenaga kerja yang ada semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pengusaha banyak menggunakan tenaga kerja kontrak dan lebih memilih menggunakan tenaga kerja yang lebih berkualitas, sehingga dampak dari kebijakan tersebut salah satunya berupa adanya pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja yang masih berkualitas buruk.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Hasil Regresi Berganda

Pengujian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan aplikasi software EvIEWS 8. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 5.Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,906716	3.150865	-0.287767	0.7777
IPM	2.000310	1.648484	1.213424	0.2450
UMP	-0.345794	0.079776	-4.334572	0.0007
R-squared	0.617210	Mean dependent var	0.701765	
Adjusted R-squared	0.562526	S.D. dependent var	0.123097	
S.E. of regression	0.081419	Akaike info criterion	-2.019635	
Sum squared resid	0.092806	Schwarz criterion	-1.872598	
Log likelihood	20.16690	Hannan-Quinn criter	-2.005019	
F-statistic	11.28678	Durbin-Watson stat	2.014152	
Prob(F-statistic)	0.001204			

Sumber : Data diolah dengan Software Eviews 8

Dari hasil analisis yang digunakan dalam regresi linier berganda hasil dituliskan dalam bentuk sebagai berikut :

$$Y = -0,906716 + 2.000310IPM - 0,345794UMP$$

Nilai konstanta β_0 sebesar - 0,906716 bearti jika Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi adalah nol atau tidak berubah maka tingkat pengangguran terbuka akan turun sebesar 0,90 persen. Koefisien Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi sebesar 2,000310 bearti setiap bahwa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan sebesar 2 persen. Koefisien Upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi sebesar - 0,345794 artinya setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 1 persen maka Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,34 persen.

Secara teoritis Indeks Pembangunan Manusia merupakan

indikator kualitas dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan standar pembangunan daerah, semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia daerah maka otomatis kualitas hidup penduduk di daerah tersebut juga semakin tinggi. Begitu juga dengan upah pekerja, secara teoritis semakin tinggi upah pekerja akan menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran.

Uji simultan (Uji F) dan Uji parsial (Uji t), Analisis koefisien determinasi (R^2) Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

R-squared	0.617210	F-statistic	11.28678
Adjusted R-squared	0.562526	Prob(F-statistic)	0.001204

Sumber Data diolah dengan software Eviews 8

Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.001204, lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% = 0.05 Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi secara Simultan (bersamaan) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji-t untuk menguji hasil setiap variabel bebas terhadap variabel terikat

secara parsial secara rinci. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. hasil uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,906716	3.150865	-0.287767	0.7777
IPM	2.000310	1.648484	1.213424	0.2450
UMP	-0.345794	0.079776	-4.334572	0.0007

Sumber: Data diolah dengan software Eviews 8

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan menggunakan koefisien regresi $\beta_0 = 5\%$ (0.05) variabel indeks pembangunan manusia dapat dilihat nilai t hitung sebesar 1.213424 dengan probabilitas sebesar 0.2450 atau lebih besar dari β_0 0.05 ($0.2450 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan menggunakan koefisien regresi $\beta_0 = 5\%$ (0.05) variabel Upah Minimum Provinsi, dapat dilihat nilai t-hitung sebesar -4.334572 dengan probabilitas variabel Upah Minimum Provinsi sebesar 0.0007 artinya kecil dari nilai koefisien regresi $\beta_0 = 0.05$ ($0.0007 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel Upah Minimum Provinsi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

Koefisien Determinasi (R^2)

R-kuadrat digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi terhadap variabel terikat yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi (R) sebesar 0.617210 hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dapat menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 61.72 persen sisanya 38.28 persen variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk diteliti selanjutnya.

Kaitan hasil penelitian terhadap teori

Secara konsep teori makro menurut sadono sukirno, pengangguran tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

Upah minimum di atas keseimbangan antara demand dan supply akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, dengan upah minimum diatas keseimbangan akan

menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja rendah yang akan menimbulkan pengangguran, sehingga perlu ditetapkan upah minimum. maka dalam penelitian ini mencoba melihat seberapa besar pengaruh variabel upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Sementara di variabel Indeks Pembangunan Manusia yaitu hal urgensi, guna menilai kesuksesan pembangunan kualitas terhadap hidup manusia yang akan mengurangi persentase dari jumlah pengangguran sebab kualitas manusia sebagai pekerja semakin baik. Permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat. Maka perlu juga diteliti seberapa besar variabel ini pengaruhnya terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dalam pebahasa penelitian ini maka diperoleh besaran pengaruh variabel upah minimum dan variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran terbuka adalah sebesar 61.72 persen

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil analisis studi sehingga dapat diketahui hubungan dan dampak Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan: koefisien korelasi Tingkat Pengangguran Terbuka bernilai positif

sebesar 0,322 maka korelasi kedua variabel bersifat searah, jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga tinggi. variabel Indeks Pembangunan Manusia untuk Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan, karena signifikansi sebesar $0,208 > 0,005$.

Koefisien korelasi untuk Tingkat Pengangguran Terbuka adalah negatif sebesar 0,760 dan korelasi antara kedua variabel tidak searah dengan kata lain jika Upah Minimum Provinsi tinggi maka Tingkat Pengangguran Terbuka rendah. Variabel Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka signifikan, karena signifikansinya adalah $0,000 < 0,005$

Secara simultan variabel independent berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. Secara parsial variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

Saran

Usulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian yang dilakukan : Kedepannya pemerintah

daerah bisa menyeimbangkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan salah satu caranya meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan Atau Upah Minimum Provinsi guna meminimalisir Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. Dengan cara memperluas lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus melakukan upaya dan tindakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam investasi dan Indeks Pembangunan Manusia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Upah Minimum Provinsi. Sehingga dapat meminimalisir Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

Daftar Pustaka

- Amrizal, A. (2022). Analisis disparitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi (Model regresi data panel 11 Kabupaten/Kota Tahun 2014–2018). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 235-246.
- Amalia, S. (2014). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap pengangguran terbuka dan kemiskinan di kota Samarinda. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(2), 173-182.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2021). *Jambi Dalam Angka. Beberapa Tahun Terbitan*.
- Badan pusat statistik <https://jambi.bps.go.id/indicator/19/172/1/upah-minimum-provinsi.html>
- Badan pusat statistik <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- Irmanelly, I. (2013). Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. *Journal Development*, 1(2), 8-16.
- Isnaini, N. S. N., & Lestari, R. (2016). Kecemasan pada pengangguran terdidik lulusan universitas. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 13(1).
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*.
- Marhaeni, A. & Sirait, N. (2013). Analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(1)
- Sukirno, S. (2013). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Group: Jakarta.
- Sukirno, S. (2014). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
- Satriawan, R. N., Militina, T., & Djohan, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan

- Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 5(3).
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2).
- Tambunan, Tulus TH. (2003). *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia: Jakarta

MODEL EFEKTIVITAS PROMOSI PRODUK LOKAL AGROINDUSTRI MENGUNAKAN PLATFORM SOSIAL MEDIA

*The Effectiveness Model Of Agroindustry Local Products Promotion Using Social
Media Platform*

Musnaini*, Asrini, Ida Ketut Mudhita*****

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi*

Email : musnaini@unja.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi**

Email : asrini.msa@umjambi.ac.id

Fakultas Pertanian, Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah***

Email : idakmudita@gmail.com

Diterima : 16 September 2022; Direvisi : 19 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.180>

Abstract

The purpose of this study is to explain the factors that contribute to increasing the effectiveness of social media using Instagram accounts as a medium for promoting agribusiness products. This study uses a quantitative descriptive approach with four dimensions, namely empathy, persuasion, impact, and communication (EPIC). The research sample was 96 respondents who were obtained from Instagram Followers at stanhanpangan_kotajambi. The data analysis method uses multiple regression and is analyzed with the SPSS version 28 program. The results of the study prove that there is the greatest influence, namely empathy, compared to persuasion, impact and communication factors, but overall the determinants are still on an effective scale.

Key words: *Instagram, Promotion, Agribusiness Products, Jambi.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor yang berkontribusi meningkatkan efektivitas media sosial menggunakan akun instagram sebagai media promosi produk agrobisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan empat dimensi yaitu *empathy*, *persuasion*, *impact*, dan *communication* (EPIC). Sampel penelitian sebanyak 96 responden yang di peroleh dari Follower Instagram distanhanpangan_kotajambi. Metode Analisa data menggunakan regresi berganda dan dianalisa dengan program SPSS versi 28. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh terbesar yaitu *empathy*, dibandingkan faktor *persuasion*, *impact* dan *communication*, namun secara keseluruhan disterminan masih berada dalam skala efektif.

Kata Kunci: Instagram, Promosi, Produk Agrobisnis, Jambi.

PENDAHULUAN

Pergeseran perilaku konsumen dalam mengambil keputusan konsumsi di era digitalisasi mendorong perubahan cara produsen maupun pemasar melakukan perubahan dalam mempromosikan produk atau jasa. Salah satu media sosial yang memiliki peran menghubungkan produk ke konsumen akhir yaitu melalui akun Instagram. Perlu diketahui bahwa tidak hanya Instagram yang menjadi alternatif untuk promosi tetapi ada beberapa akun atau platform media sosial yang bisa digunakan.

Adanya *platform* media sosial, menjadi salah satu sumber rujukan yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam mencari berbagai informasi. Masyarakat menjadi lebih aktif dan sering mengakses *platform* media sosial seperti instagram, facebook, twitter, youtube, dan lainnya. Banyak yang melatarbelakangi media sosial banyak digunakan saat ini, terlebih di situasi pandemi seperti adanya himbauan untuk *social distancing* atau *physical distancing*, yang memaksa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Media sosial tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja tetapi juga sebagai alat komunikasi pemasaran seperti bisnis, jual beli dan menawarkan produk atau jasa.

Wantika *et al.* (2021) mengatakan media sosial seperti Instagram dapat menguntungkan pemasar untuk menaikkan popularitas dari produk, *brands* dan perusahaan. Saat ini, pengguna internet kategori *Online Search Behavior* sekitar 65,1% pengguna internet di Indonesia usia 16-64 tahun menggunakan sosial media sebagai sumber utama saat meneliti sebuah *brands*, dan hamper 69% penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Menurut Mahdi (2022) media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia yaitu Whatsapp persentasenya tercatat mencapai 88,7%. setelahnya ada Instagram 84,8% dan Facebook 81,3%. TikTok 63,1% dan Telegram 62,8%, artinya pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta atau hamper 69 % dari total penduduk Indonseia pada tahun 2022.

Terkait promosi produk dan jasa di bidang agrobisnis selayaknya juga bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Menurut Tarmizi *et al.*, (2020) bahwa eisiensi pengelolaan industri makanan telah mendorong penerapan sistem ketertelusuran produk dengan bantuan *internet of things* (IoT). Sistem promosi dengan pemanfaatan IoT telah memudahkan pelaku industri makanan dalam mengelola informasi produk mereka di

sepanjang rantai pasokan. Sebagai salah satu kunci industri makanan halal pemain, usaha kecil dan menengah (UKM) agro-makanan halal dilaporkan belum merangkul adopsi IoT. Dengan IoT, rantai pasokan UKM agro-makanan halal telah tidak diragukan lagi menyediakan platform tepercaya seperti Whatapps, Instagram, Telegram atau media sosial yang menggunakan internet.

Secara umum, pasar agropangan dikendalikan oleh pemangku kepentingan swasta berukuran lebih besar yang mencari kendali atas rantai pasokan mereka melalui integrasi vertikal; meskipun struktur ini tidak diragukan lagi berkontribusi untuk meningkatkan tingkat produktivitas, mereka juga menghasilkan beberapa eksternalitas negatif dengan dampak langsung pada pembangunan berkelanjutan pertanian kecil dan keluarga yang mengarah pada peningkatan marginalisasi, ketimpangan dan kerentanan. Dengan demikian, ada kebutuhan yang signifikan untuk menciptakan layak alternatif ekonomi dari sistem pertanian yang ada yang didominasi oleh UKM.

Beberapa pertanyaan penelitian muncul terkait bagaimana skala efektifitas promosi pemasaran untuk mencapai skala ekonomi dan penghematan biaya yang dihasilkan

bersama dengan pengembangan dan penyesuaian untuk pasar baru, padahal lingkungan bisnis, ekonomi, sosial dan fisik yang selalu berubah (Ioannis et.al., 2019).

Pengukuran efektifitas sebuah iklan atau promosi dilakukan beberapa penelitian dengan menggunakan EPIC Mode (*Empathy, Persuasion, Impact, and Comunication*). EPIC model digunakan untuk mengukur efektivitas iklan yang disampaikan itu dapat menarik perhatian, dimengerti, dipahami, membangkitkan emosi dan menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian atau proses keputusan mengkonsumsi produk atau jasa (Hardianto & Pratomo; Ioannis et al., 2019). EPIC model memiliki empat dimensi kritis, yaitu: empati, persuasi, dampak, dan komunikasi (*Empathy, Persuasion, Impact, and Comunication*). Ke empat dimensi kritis tersebut akan didapatkan batasan (*range*) yang akan menentukan posisi suatu iklan (Mahdi & Nastiti, 2022; Amira & Nurhayati, 2019).

Kebaharuan penelitian ini terletak pada mengukur atau menjelaskan strategi promosi tidak menggunakan bauran promosi (*promotion mix*) tetapi menggunakan dimensi *Empathy, Persuasion, Impact, and Comunication (EPIC)* hasil dari perhitungan *range EPIC* dapat memudahkan perusahaan

atau produsen untuk mengatasi kelemahan pada dimensi yang dinilai paling tidak efektif dan menetapkan media promosi yang paling efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul pertanyaan penelitian Bagaimanakah tingkat efektivitas iklan produk agroindustri melalui media sosial instagram dengan pendekatan EPIC Model?. Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan efektivitas promosi menggunakan Instagram dengan empat dimensi EPIC model. Kontribusi hasil penelitian ini yaitu berupa model promosi menggunakan media sosial yang tepat guna bagi industri Agro.

LANDASAN TEORI

Digital Marketing

Digital Marketing atau bisa disebut pemasaran digital adalah suatu usaha atau metode untuk memasarkan sebuah merek atau produk dengan menggunakan media pendukung dalam bentuk digital. Pada dasarnya *digital marketing* hampir sama dengan pemasaran konvensional. *Digital marketing* menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya sangat besar karena tidak terbatas tempat dan juga waktu untuk melihat produk kita. Tinggal selanjutnya, untuk mendapatkan

peluang tersebut seorang *marketer* harus belajar lebih dalam mengenai teknik-teknik mengenai digital marketing dalam dunia usaha kecil menengah (Musnaini *et al.*, 2020)

Promosi

Promotion atau promosi merupakan kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen agar mereka melakukan pembelian produk. Kegiatan promosi bercerita mengenai keunggulan produk yang ditawarkan serta membujuk pasar sasaran untuk membelinya (Mahdi *et al.*, 2022). Definisi promosi yang digunakan pada penelitian Wantika *et al.* (2021) yaitu promosi dapat diukur dari tingkat kemenarikan iklan dan publisitas pesaing.

Media Sosial

Definisi media sosial adalah teknologi berbasis internet yang memfasilitasi percakapan. Perbedaan pokoknya dengan aplikasi web tradisional adalah pada platform berupa *content creation*, *content upload*, *networking*, *covering*, *media sharing*, dan *bookmarking* (Ghosal, 2019). Secara garis besar, media sosial dapat dikelompokkan menjadi lima macam *egocentric sites* (memungkinkan pengguna untuk membuat profil), *community sites* (membangun komunitas di dunia

virtual), *opportunistic sites* (memfasilitasi bisnis), *passioncentric sites* (berhubungan dengan sesama peminat tertentu), dan media *sharing sites* (berbagi konten gambar, audio, dan video) (Amira & Nurhayati, 2019).

Media Sosial Instagram

Pemahaman Instagram menurut Amira dan Nurhayati, (2019) yaitu Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara *online*. Berkembangnya fitur-fitur yang menunjang Instagram sebagai sosial media saat ini. Termasuk pada fitur *Insta-story* atau *Instagram stories*.

Atmoko (2012) menyatakan bahwa terkait Instagram adalah layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mampu menjangkau 25 ribu pengguna di hari pertama. Selain itu Atmoko (2012), juga menyatakan bahwa nama instagram merupakan kependekan dari kata "*instan-telegram*". Menurut website resmi Instagram, Instagram adalah cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi hidup anda dengan teman-teman melalui serangkaian gambar. Bidik foto dengan ponsel atau tablet anda lalu pilih filter untuk mengubah gambar.

Fungsi Instagram bagi penggunaan Instagram *stories* sangat sederhana untuk dapat mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain terutama digunakan sebagai bisnis. Selain` dilengkapi fitur Instagram Stories yang menyenangkan karena dilengkapi dengan penunjang foto, video, teks dan filter-filter lucu. Penggunaan Instagram stories memiliki manfaat besar bagi penggunanya.

Agroindustri

Pengertian Agroindustri yaitu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi faktor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian (Tarmizi *et al.*, 2020).

Melalui modernisasi di sektor agroindustri dalam skala nasional, penerimaan nilai tambah dapat di tingkatkan sehingga pendapatan ekspor akan lebih besar lagi (Soekartawi, 2005) mendefinisikan agroindustri dalam dua hal, yaitu pertama agroindustri sebagai industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian dan kedua agroindustri sebagai suatu tahapan pembangunan sebagai kelanjutan dari produksi

produk pertanian, sehingga tahapan pembangunan agro industri harus diikuti dengan membangun opini konsumen untuk mengkonsumsi produk agro maupun pengembangan inovasi agroindustri dengan menggunakan internet atau media sosial (Tarmizi et al., 2020; Ioannis et al., 2019).

EPIC Model

Menurut beberapa peneliti Amira dan Nurhayati, (2019); Wantika et al., (2021); Mahdi et al., (2022) bahwa metode EPIC model yaitu mengukur efektivitas iklan dari dampak komunikasi dengan menggunakan empat dimensi kritis, yaitu: empati, persuasi, dampak, dan komunikasi (*Empathy, Persuasion, Impact, and Communication*). (1) *Variable empathy* yang diukur dengan pendapat konsumen mengenai iklan dan tingkat ketertarikan terhadap iklan. (2) variabel *Persuasion* yang diukur dengan ketertarikan konsumen terhadap produk yang diiklankan dan keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. (3) Variabel *Impact* diukur dengan tingkat pengetahuan konsumen mengenai tingkat kreatifitas iklan jika dibandingkan dengan iklan produk lain. (4) Variabel *Communication* yang diukur dengan tingkat kejelasan informasi yang disampaikan, iklan dapat membuat konsumen mengerti

mengenai informasi yang disampaikan, dan slogan produk dari produk yang telah tercermin dalam iklan yang disajikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif bersifat kuantitatif untuk penjelasan terkait hubungan antar variabel *empathy, persuasion, impact* dan *Communication* yang mempengaruhi efektivitas promosi online menggunakan Instagram.

Populasi dan sampel yaitu *followers* instagram @distanhanpangan_kotajambi karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka menggunakan rumus Cochran didapatkan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Jenis dan sumber data primer yaitu kuesioner dan studi pustaka, instrumen skala pengukuran adalah skala *likert*, dimana instrumen penelitian di uji validitas dan uji reliabilitas dan regresi berganda yang dianalisis dengan *software SPSS* Versi 28.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil analisa statistic descriptive menggunakan software SPSS, diperoleh gambaran responden berdasarkan karakteristik demografi (Jenis kelamin, pekerjaan,

pendapatan, penggunaan media sosial indstagram). Pada tabel 1 menunjukkan prosentase demografi responden penelitian ini.

Tabel 1: Deskripsi demografi responden

Kelamin	Responden	Persentase
Pria	56 Orang	42%
Wanita	40 Orang	58%
Usia	27-46 Tahun	71%
Perkerjaan	Swasta	37,5%
Pendapatan	>5 Juta Rupiah	37,5%
Penggunaan Instagram/hari	>2 Jam	49%

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 1 menggambarkan demografi responden dan konsistensi menggunakan Instagram sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi di dunia maya. Dari intensitas penggunaan Instagram perhari menunjukkan bahwa Instagram merupakan akun penting yang selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fakta ini dapat dimanfaatkan oleh pemasar untuk melakukan promosi produk atau jasa dalam bidang agroindustri.

Setelah hasil analisa deksriptif diperoleh, maka perlu ditinjau hasil analisa validitas dan reliabilitas dari setiap item pertanyaan kuisisioner yang dijawab oleh responden. Pada tabel 2 berikut menyajikan hasil analisa uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Tabel 2. Hasil uji instrumen

Dimensi EPIC Model	Item	r – Hitung	Status
Empathy	E1	0,752	Valid
	E2	0,529	Valid
	E3	0,710	Valid
	E4	0,788	Valid
Persuasion	P1	0,701	Valid
	P2	0,795	Valid
	P3	0,831	Valid
	P4	0,747	Valid
Impact	I1	0,659	Valid
	I2	0,635	Valid
	I3	0,654	Valid
	I4	0,689	Valid
Communication	C1	0,809	Valid
	C2	0,832	Valid
	C3	0,547	Valid
	C4	0,724	Valid
Cronbach's Alpha		0,843	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022

Gambaran yang diperoleh pada tabel 2 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner memiliki tingkat kevalidan dan kehandalan untuk mengungkapkan atau menjelaskan variabel independen penelitian ini. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai setiap item lebih dari 0,5 yang menggunakan data dengan sampel (n) sebesar 96 responden dan besarnya f dapat dihitung $96-2 = 94$ dan *alpha* 0,05 didapat r-Tabel = 0,202. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid (Sugiyono, 2019).

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuisisioner yaitu *Cronbach's Alpha* sebesar 0,843 karena nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 maka

kuisioner dalam penelitian ini adalah reliabel.

Analisis Efektifitas Variabel EPIC

Berdasarkan hasil Analisa terhadap model EPIC yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa

hipotesis dapat terjawab. Hal ini dapat dilihat hasil Analisa uji efektifitas promosi (iklan) berdasarkan dimensi EPIC. Hasil uji elektifitas model tersebut disampaikan pada Tabel 3 berikut.

Table 3. Hasil uji efektifitas EPIC

Skala	Bobot	Dimensi <i>Empathy</i>											
		Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden	Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden	Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden	Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden	Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden	Jumlah Responden	Bobot × Jumlah Responden
		E1		E2		E3		E4		E5		E6	
SS	5	24	120	38	190	29	145	29	145	38	190	44	220
S	4	32	128	47	188	36	144	46	184	43	172	42	168
N	3	35	105	11	33	26	78	17	51	14	42	10	30
TS	2	5	10	0	0	4	8	4	8	1	2	0	0
STS	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Tot al		96	363	96	411	96	376	96	388	96	406	96	418
Rata-Rata		3,78		4,28		3,91		4,04		4,22		4,35	
							4,09						

Sumber: Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 memberikan pembuktian bahwa hasil nilai rata-rata skor untuk dimensi *empathy*, *persuasi*, *impact* dan *communication* dengan masing-masing dimensi menggunakan 4 pernyataan mendapat rata-rata 3,82 hingga 4,13 ini termasuk dalam rentang skala efektif. Nilai tertinggi terlihat dari dimensi persuasi yaitu 4,13 yang menunjukkan efektivitas promosi melalui media sosial instagram @distanhanpangan_kotajambi Artinya seluruh indikator penilaian yaitu perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku dengan segala

stimulus yang ada dalam iklan di akun instagram @distanhanpangan_kotajambi.

EPIC Rate

Tingkat efektivitas iklan pada instagram @distanhanpangan_kotajambi diukur dengan mengambil rata-rata (EPIC Rate) pada *empathy*, *persuasion*, *impact*, dan *communication*. EPIC Model dilakukan untuk mengukur efektivitas promosi dari sisi komunikasi. Untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap dimensi model tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisa perbandingan tingkat efektifitas

model EPIC rate. Hasil uji range EPIC model sebagai pengukur efektifitas promosi / iklan menggunakan media social Instagram dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Epic rate

EPIC Model	Skor	Kesimpulan
<i>Empathy</i>	4,09	Efektif
<i>Persuasion</i>	4,13	Efektif
<i>Impact</i>	3,98	Efektif
<i>Communication</i>	3,82	Efektif
<i>EPIC RATE</i>	4,05	Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 di atas, hasil *EPIC Rate* rata-rata keempat dimensi *EPIC Model* yaitu 4,05 yang menunjukkan efektivitas promosi melalui media sosial menggunakan instagram @distanhanpangan_kotajambi ini termasuk dalam rentang skala efektif cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa promosi melalui media instagram bermanfaat untuk menarik minat konsumen membeli produk UMKM sektor agroindustri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi menggunakan media social instragram yang memiliki peran penting yaitu persuasi. Dimensi persuasi (*persuasion*) merupakan dimensi menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu iklan untuk peningkatan atau penguatan karakter suatu merek, sehingga pemasang iklan

memperoleh keuntungan dari iklan tersebut, yaitu keinginan konsumen untuk membeli produk perusahaan. Persuasi (*persuasion*) adalah perubahan kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku yang disebabkan satu komunikasi promosi. Proses persuasi ditentukan melalui tingkat keterlibatan konsumen dalam pesan promosi sebuah produk.

Untuk menetapkan tujuan, harus mengetahui status terbaru dari audiens sasaran, terutama mengenai variabel hierarki responsnya seperti kesadaran, pengetahuan, citra, sikap, dan minat untuk kemudian menentukan pada tingkat mana konsumen harus dirubah dengan kampanye periklanan (Belch, 2004). Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Berbagai anteseden dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen dalam beberapa cara, termasuk cara konsumen merespons iklan, produk yang diiklankan, dan keputusan pembelian (Belch, 2004).

Memahami bahwa konsumen dapat terlibat dengan produk dikarenakan adanya pembelian yang berisiko dan penggunaannya merefleksikan atau mempengaruhi diri, pengembangan dari sebuah profil

keterlibatan yang meliputi lima komponen, yaitu:

1. Ketertarikan pribadi yang dimiliki konsumen terhadap kategori produk, arti, dan kepentingan pribadi.
2. Kepentingan yang dipersepsi dari konsekuensi negatif yang potensial, diasosiasikan dengan pilihan produk yang menyedihkan.
3. Kemungkinan melakukan pembelian yang buruk.
4. Nilai tambahan dari kategori produk.
5. Nilai tanda dari kategori produk (berhubungan dengan diri).

Strategi pemasaran yang efektif salah satunya dengan kegiatan promosi. Salah satu media yang termasuk media internet adalah media sosial. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mahdi *et al.* (2022) yaitu bahwa tujuan untuk menganalisis efektivitas promosi produk UMKM di media Instagram juga memiliki tingkat efektivitas promosi yang diukur dengan konsep AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) terbukti berkontribusi pada efektivitas promosi UMKM makanan dan minuman kota Pekanbaru di media Instagram pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa promosi melalui media

instagram bermanfaat untuk menarik minat konsumen membeli produk UMKM sektor makanan dan minuman (Khairani *et al.*, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Efektifitas promosi / iklan menggunakan media sosial dengan instagram ini yang paling tinggi yaitu dimensi persuasi. Keinginan membeli produk agroindustri lebih efektif jika informasi atau promosi dengan *followers* akun Instagram : @distanhanpangan_kotajambi.berifat persuasif karena bisa merubah kepercayaan, sikap, dan keinginan berperilaku dengan segala stimulus yang ada dalam iklan di akun Instagram tersebut.

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan konsep strategi pemasaran digital, menggunakan media sosial berupa whatsapp karena akun tersebut yang paling besar penggunaanya. Selain itu, model EPIC bisa di bandingkan dengan konsep AIDA untuk mengukur efektifitas strategi promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tarmizi, H., Kamarulzaman, N., A. R., & Atan, R. (2020). Adoption Of Internet Of Things Among

- Malaysian Halal Agro-Food Smes And Its. *Food Research*, 256 - 265.
- Amira, N., & Nurhayati, I. K. (2019). Efektivitas Fitur Instagram Sponsored Sebagai Media Iklan/Promosi (Studi Pada Iklan Tiket.Com Dengan Metode Epic Model). . *Journal Of Media And Communication Science*, 2(2), , 116–126.
- Atmoko Dwi, B. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.
- Hardianto D & Pratomo A. I. (2013). Faktor-Faktor Sistem Interaksi Yang Mempengaruhi Efektifitas Iklan Online. *Jurnal Sistem Informasi* , 234-242.
- Ghosal, M. (2019). Social Media As An Effective Tool To Promote Business- An Mpircal Study. . *Ejournal Of Management And Business Research : Emarketing* , 1-9.
- Ioannis Manikas, George Malindretos, & Moschuris, S. (2019). A Community-Based Agro-Food Hub Model For Sustainable Farming. *Mdpi Journal*, 1-17.
- Khairani, Z., Soviyanti, E., & Aznuriyandi. (2018). Efektivitas Promosi Melalui Instagram Pada Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Benefita* , 239-247.
- Mahd, A. W., Triwardhani, D., & Nastiti, H. (2022). Pengukuran Efektivitas Iklan Gojek Menggunakan Metode Epic Model Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Manajmen Dan Inovasi*, 1-14.
- Mahdi, M. I. (2022, Februari 25). Pengguna Media Sosial Di Indonesia. *Engguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022*.
- Musnaini, Wijoyo, H., Indrawan., I., & Syahtriatna. (2020). *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Banyumas: Penerbit Cv. Pena Persada.
- Soekartawi. (2005). *Agribisnis Teori Dan Aplikasinya*. . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Cv Alfabet.
- Wantika D. A, .Sapari Y, & U., M. (2021). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Online (Analisis SWOT Akun Instagram @Olala.Closets). *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 11-21.\

ANALISIS VOLUME PENJUALAN GAS ALAM MELALUI SALURAN PIPA MENURUT JENIS PELANGGAN (MMSCF) DI INDONESIA DARI TAHUN 2010 - 2020

*Analysis Of Natural Gas Sales Volume Through Pipelines By Customer Type
(MMSCF) In Indonesia From Year 2010- 2020*

Trie Hierdawati*, Rian Dani**,
Universitas Muhammadiyah Jambi, triehierdawati09@gmail.com*
UIN STS Jambi, riandani0193@gmail.com**

Diterima : 19 September 2022; Direvisi : 22 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.174>

Abstract

The purpose of this study is to analyze the sales volume of natural gas through pipelines by type of customer (mmscf) in Indonesia, 2010-2020. The development of natural gas sales volume through pipelines by type of customer (MMSCF) in Indonesia, 2010-2020 is an average of 5.08% with the average sales volume of natural gas through pipelines by type of customer (MMSCF) in Indonesia is 326,837 tons where for the condition of the development of natural gas sales volume through Pipelines by Type of Customer (MMSCF) in Indonesia, the highest occurred in 2012 at 21.82% or with a volume value of 300,556 tons, a sharp increase compared to 2011 which amounted to 212,975 tons. Meanwhile, for natural gas sales volume conditions through pipelines by type of customer (MMSCF) in Indonesia, the lowest occurred in 2020, which was 12.47% or with a volume value of 333,315 tons. Sales volume of Natural Gas through Pipelines by Type of Customer (MMSCF) in Indonesia, 2010-2020, the highest were industrial customers, amounting to 85.46% while for the lowest contribution value for the type of customer to the sales volume of Natural Gas Through Pipelines by Type Customers (MMSCF) in Indonesia, 2010-2020 are in households, namely 0.23%, followed by SPBE/SPBG customers, which are 0.41%.

Keywords: Natural Gas Sales, Customer Type

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis volume penjualan gas alam melalui saluran pipa menurut jenis pelanggan (mmscf) di Indonesia, 2010-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder periode 2010-2020 pada Badan Pusat Statistik. Perkembangan volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 adalah rata-rata sebesar 5,08% dengan rata-rata volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia adalah sebesar 326.837 ton dimana untuk kondisi perkembangan volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 21,82% atau dengan nilai volume sebesar 300.556 ton meningkat tajam dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 212.975 ton. Sedangkan untuk kondisi volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,47% atau dengan nilai volume sebesar 333.315 ton. Volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 yang paling tinggi terdapat pelanggan industri yaitu sebesar 85,46% sedangkan untuk nilai kontribusi paling rendah untuk jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 terdapat di rumah tangga yaitu sebesar 0,23% disusul pelanggan SPBE/SPBG yaitu sebesar 0,41%.

Kata kunci: Penjualan Gas Alam, Jenis Pelanggan

PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa untuk mengimplementasikan capaian Ditjen Migas pada tahun 2020. Tidak mudah untuk menyelesaikan perjalanan tahun 2020. Banyak perubahan dalam kinerja tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Ditjen Migas. minyak dan gas. Ada beberapa perbedaan masa pandemic Covid-19 di Ditjen Migas, antara lain: Perencanaan sumber daya dan strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Alam, berdasarkan konsep sistem Balanced Scorecard (BSC).). 2. Akibat dampak dari infeksi virus corona baru, sebagian besar pertunjukan di 2020 dilaksanakan cara WFH, namun beberapa kegiatan dilakukan WFO. 3. Ada perubahan dalam birokrasi (Widyaningsih, G.A., 2017).

Hasil kinerja Ditjen Migas 2020 terkait dengan delapan Strategic Objectives (SS) yang tertuang dalam Performance Agreement. • SS pertama adalah mencapai ketahanan dan kemandirian energi minyak dan Gas Alam melalui pasokan minyak dan gas yang berkelanjutan, terjangkau, cukup dan dapat diakses. Metrik kinerja adalah: Indeks ketersediaan minyak dan gas. b. Keakuratan formulasi harga minyak dan gas relatif terhadap harga kuota.

c. Indeks Aksesibilitas Minyak dan Gas Alam. yaitu proporsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan Gas Alam. Kedua, memaksimalkan subsector migas dengan ketentuan ini: a. berapa persen dalam investasi subsector migas. b. Persentase subsector migas yang telah mencapai PNBK.

Ketiga, Pelayanan Optimal Subsector Migas dengan KPI: Indeks Kepuasan Pelayanan Subsector Migas (Parmadi, P., Emilia, E., & Zulgani, Z., 2018). Rata-rata target kinerja yang dicapai Ditjen Migas adalah 111,47% untuk 8 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama. Dari sisi akuntabilitas keuangan dan penggunaan anggaran, pandemi Covid-19 akan berdampak pada penataan kembali anggaran pada tahun 2020. Semula ditetapkan sebesar Rp4.115,96 miliar, pagu anggaran Ditjen Migas diturunkan menjadi Rp2.136,2 miliar melalui APBN Perubahan 2020. Namun demikian, dengan anggaran infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, anggaran 2020 masih lebih besar dari anggaran 2019. Per 31 Desember 2020, total pagu (beban karyawan, Beban Barang, Belanja Modal) telah berkurang 97,04% dalam batas anggaran. Kinerja ini lebih tinggi

dari kinerja lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan parameter yang mendukung pencapaian delapan sasaran strategis, 15 indikator kinerja masuk dalam kategori “sangat baik” (tingkat pencapaian 75% atau lebih tinggi), 13 di antaranya termasuk dalam kategori “sangat baik”. Kategori tinggi (100% atau lebih tinggi). Indikator realisasi subsektor migas sebagai persentase PNBPN menunjukkan kinerja terbaik dengan adopsi 155%. Sedangkan yang paling buruk kinerjanya adalah indikator Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan tingkat adopsi 95%. Keberhasilan pencapaian ini, berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, adalah Ditjen Migas menyelaraskan langkah-langkah strategis dan merencanakan program dan kegiatan sejalan dengan tantangan sulit yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dan tetap utamakan protokol kesehatan. Namun, masih banyak tantangan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah Indonesia, kondisi ekonomi global, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan faktor teknologi lainnya. Yang sangat penting adalah dampaknya terhadap pencapaian target kinerja pemerintah di subsektor migas. Untuk itu Ditjen

Migas terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun agar dapat beroperasi lebih efisien. Kebijakan gas ke depan akan difokuskan pada peningkatan penggunaan gas dalam negeri dengan harga kompetitif untuk menciptakan efek pengganda, daya saing industri, lapangan kerja (Widyastuti, N.L., & Nugroho, H., 2020). Peningkatan penggunaan gas kota, penggunaan Gas Alam untuk pembangkit listrik, perbaikan infrastruktur Gas Alam, terutama jaringan pipa gas jarak jauh, off-grid seperti penerimaan LNG, dll Peningkatan penggunaan gas dalam negeri melalui terminal distribusi pipa, Dimungkinkan untuk meningkatkan penggunaan gas alam terkompresi dalam transportasi, membangun kilang lokal, mengubah generator diesel menjadi gas, dan mengubah bahan bakar untuk pembangkit listrik kapal menjadi gas alam. Salah satu strategi untuk meningkatkan penggunaan gas bumi adalah dengan menyesuaikan harga gas di beberapa industri sebagai implementasi dari Kepmen No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas untuk Beberapa Industri Tahun 2020 dan No. 89/K yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM. . Keputusan Menteri ESDM No. 91/K. Listrik 2020 (Sulistyono, S., 2017). Selanjutnya

dari segi swasembada dan ketahanan pangan nasional, tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pupuk, tetapi juga meningkatkan daya saing industrinya untuk substitusi ekspor dan impor (Antosa, S., 2011). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dan tema pengembangannya adalah sebagai berikut:

Indonesia adalah negara berpendapatan menengah yang makmur, adil dan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020-2024, rencana terkait subsektor migas difokuskan pada pengembangan ekonomi yang lebih besar, inklusif, dan kompetitif untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan. Fokus pada infrastruktur juga bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Tujuh agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024 adalah: 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan pemerataan. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing

sumber daya manusia. 4. Revolusi spiritual dan pengembangan budaya.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud meneliti bagaimana stabilitas harga dan produksi volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS VOLUME PENJUALAN GAS ALAM MELALUI SALURAN PIPA MENURUT JENIS PELANGGAN (MMSCF) DI INDONESIA, 2010-2020”.

LANDASAN TEORI

Gas alam merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas (Asip, F., & Okta, T., 2013). Gas alam juga sering disebut gas alam atau gas lahan basah. Gas alam ditemukan di ladang minyak, gas alam dan tambang batu bara. Komponen utama gas alam adalah metana (CH₄). Metana adalah molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Metana adalah gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global ketika dilepaskan ke atmosfer. Ketika metana dilepaskan ke atmosfer, umumnya dianggap sebagai polutan daripada sumber energi yang

berguna. Namun, metana di atmosfer bereaksi dengan ozon menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dan air. Oleh karena itu, efek rumah kaca dari metana yang dilepaskan ke atmosfer relatif berumur pendek.

Penggunaan gas alam di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an. Saat itu, gas bumi dari lapangan gas PT Stanbak Indonesia di Pendopo, Sumatera Selatan dialirkan melalui pipa gas ke pabrik pupuk PT Pupuku Sriwijaya di Pusri IA di Palembang, Sumatera Selatan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. (Atomoko, T.P.H. (2018).

Sejak tahun 1974, penggunaan gas alam di Indonesia berkembang pesat. PT Pertamina (Persero) mulai memasok gas bumi dari lapangan gas Prabumulih di Sumatera Selatan ke pabrik pupuk Pusri II, III dan IV miliknya di Palembang melalui pipa gas. Penggunaan gas bumi sudah mulai merembes ke wilayah lain di Indonesia.

Gas alam memiliki potensi pengembangan yang tinggi di dalam negeri. (Kholiq, I. (2015) Potensi cadangan gas dalam negeri lebih besar dari minyak. Pada tahun 2006,

sebanyak 2,269 triliun British Thermal Unit (tbtu) gas alam dapat diekstraksi dari nusantara. Sebagian gas akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 843 tbtu (37%). Sisanya 1.426 tbtu (63%) akan diekspor dalam bentuk LNG atau gas melalui pipa. (Badan Pusat Statistik, 2020). Cadangan gas alam diperkirakan cukup untuk 60 tahun ke depan. Sektor-sektor yang selama ini paling banyak mengkonsumsi minyak, tetapi paling sedikit gas alam, adalah transportasi, rumah tangga, usaha kecil atau konsumen. Menurut data tahun 2005, konsumsi minyak rumah tangga mencapai 11,3 juta kiloliter (kl). Pertumbuhan ekonomi membutuhkan ketersediaan sumber energi yang tidak berskala kecil. Belum lagi masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh sumber energi minyak bumi. Visi pembangunan bidang energi (Visi Energi) yang dirumuskan dalam KUBE 1998 adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya energi yang menciptakan nilai tambah yang tinggi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Iqbal, M., 2016).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga hasil penelitian

yang dicapai dapat dikatakan valid (Machmud, M., 2016). Jenis data survei ini adalah volume penjualan Gas Alam dan jenis pelanggan di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Sumber data diperoleh dari lembaga BPS dan publikasi ilmiah terkait. Analisis evolusi volume penjualan Gas Alam menurut pipa (MMSCF) menurut jenis pelanggan di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020 menggunakan rumus pertumbuhan sebagai berikut: $Y = Y_{t-1} - Y_{t-0} / Y_{t-0}$

Untuk menganalisis kontribusi jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$Kont = \frac{\sum_{n=1}^{n-1}}{\sum_{n=1}} \times 100\%$$

Meningkatnya jumlah Kasus positif yang terjadi setiap hari telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah Sektor Perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian Indonesia dengan keras. Kasus pertama diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020. Pada 2 Maret 2020, nilai tukar Rupiah tidak melemah seperti saat ini.

Nilai tukar USD ke IDR pada tanggal 2 Maret 2020 adalah IDR 14.265,00 dan hari ini, 9 Apr 2020, nilai tukar USD ke IDR adalah IDR 15.880.004. Akibatnya, rupiah melemah 1.615 poin atau 11,32% dalam 39 hari. Pelemahan rupiah terparah sebelum 10 April 2020 terjadi pada 23 Maret 2020 di level USD 1/IDR 1. 16.575,00 atau pengurangan sebesar 16,19%. Kondisi Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia :

Kebijakan Energi Nasional 1. 28% atau Rp. 428 triliun penerimaan negara (2012), berasal dari sektor ESDM. 2. Bahan bakar dan listrik masih disubsidi (Rp 225 triliun pada 2012) dan 77% bukan target tetap. 3. Investasi di sektor ESDM mencapai \$27 miliar (2011), dengan iklim investasi yang sangat kondusif. 4. Indonesia memiliki energi yang beragam. Meski cadangannya terbatas, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Pemanfaatan EBT masih sekitar 6%. EBT akan mencapai 17% pada tahun 2025. 6. Tingkat pemanfaatan Gas Alam domestik adalah 56% untuk ekspor dan 44% untuk domestik. 7. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyediaan energi rumah. 8. Akses energi masih terbatas, dengan tingkat elektrifikasi

73%. Kontraktor tidak boleh merusak saluran air di dekat sistem pipa gas tanpa persetujuan Dewan Pengawas. Dengan mempermudah penggalian dan pemasangan pipa gas bila diperlukan, aliran air dapat dipindahkan sementara. e) Pekerjaan konstruksi di seberang jalan Di beberapa tempat, pembangunan jaringan Gas Alam melintasi jalan. Salah satu contohnya adalah Kota Depok. Dalam hal ini underpass jalan raya dibuat dengan konstruksi atau penggalian khusus yang harus dilakukan dengan menggunakan bor mekanik atau alat lain yang disetujui agar tidak mengganggu lalu lintas. Pengeboran manual tidak diizinkan. Kedalaman pipa di bawah permukaan jalan minimal 2.000 mm dari permukaan jalan sampai ke atas pipa. Penting untuk mempertimbangkan ruang kerja saat memasang mesin bor, dll. Pipa selubung harus digunakan saat melakukan pengeboran ini. Rongga antara lubang bor dan pipa harus dihindari saat pengeboran. Untuk melindungi pipa yang diletakkan dari pengaruh tekanan gandar dari atas dan getaran kendaraan, sistem ini dipasang dalam bentuk pelapis pipa atau dengan batu semen, tergantung pada fitur jalan yang akan dilalui. f. Perlindungan Kereta Api Pembangunan jaringan distribusi

Gas Alam Kota Depok juga akan memotong rel kereta api. Penanaman pipa di sepanjang rel kereta api dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jarak galian dan pengaturan lubang pemeliharaan pipa harus menjamin keselamatan konstruksi rel kereta api dan pekerjaan karet. o Kedalaman pipa tanam minimal 1,5 m di bawah permukaan tanah (underground). Itu dilakukan dengan penggalian atau penggalian, tergantung pada persyaratan teknis. Pipa yang diletakkan di bawah rel tidak boleh dibuka paksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

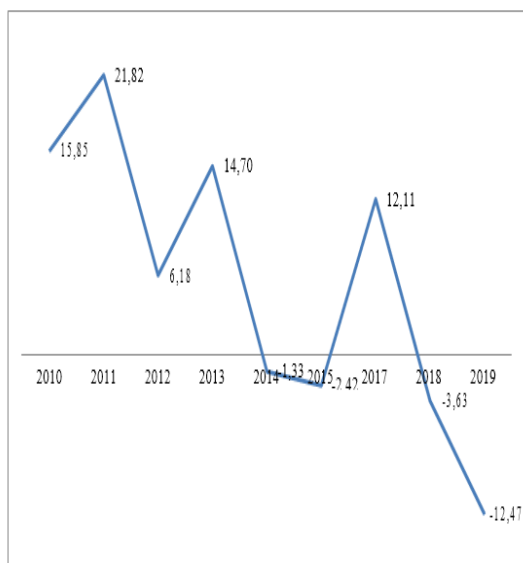
Untuk menganalisis hasil temuan terkait dengan perkembangan volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF), 2010-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.Perkembangan Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010 – 2020

Tahun	Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia	%
2010	212.975	~
2011	246.724	15,85
2012	300.556	21,82
2013	319.135	6,18
2014	366.055	14,70
2015	361.185	-1,33
2017	352.462	-2,42
2018	395.156	12,11
2019	380.810	-3,63
2020	333.315	-12,47
Rata	326.837	5,08

Sumber: BPS 2022

Sedangkan untuk kondisi volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,47% atau dengan nilai volume sebesar 333.315 ton. Secara umum kondisi fluktuasi volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1. Perkembangan Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020

Hasil temuan terkait dengan Kontribusi jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

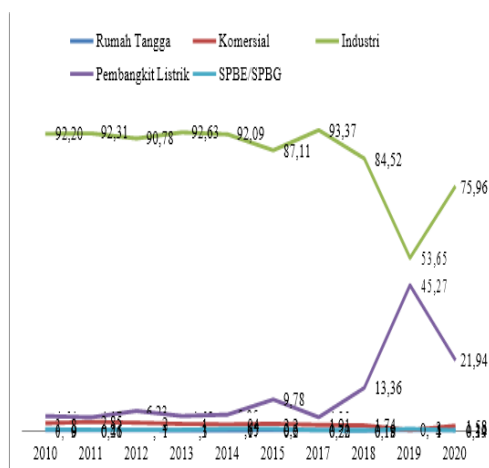
Tabel 2.1. Kontribusi Jenis Pelanggan Terhadap Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020

Tahun	Rumah Tangga	Industri	SPBE/SPBG	Lain-lain
2010	85,46	0,23	0,41	13,90
2011	85,46	0,23	0,41	13,90
2012	85,46	0,23	0,41	13,90
2013	85,46	0,23	0,41	13,90
2014	85,46	0,23	0,41	13,90
2015	85,46	0,23	0,41	13,90
2016	85,46	0,23	0,41	13,90
2017	85,46	0,23	0,41	13,90
2018	85,46	0,23	0,41	13,90
2019	85,46	0,23	0,41	13,90
2020	85,46	0,23	0,41	13,90
Rata-rata	85,46	0,23	0,41	13,90

Sumber: BPS 2022

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 yang paling tinggi terdapat pelanggan industri yaitu sebesar 85,46% sedangkan untuk nilai kontribusi paling rendah untuk jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 terdapat di rumah tangga yaitu sebesar 0,23% disusul pelanggan SPBE/SPBG yaitu sebesar 0,41%. Secara umum untuk melihat fluktuasi kondisi kontribusi jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia,

2010-2020 terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1. Kontribusi Jenis Pelanggan terhadap Volume Penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Perkembangan volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 adalah rata-rata sebesar 5,08% dengan rata-rata volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia adalah sebesar 326.837 ton dimana untuk kondisi perkembangan volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 21,82% atau dengan nilai volume sebesar 300.556 ton meningkat tajam

dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 212.975 ton. Sedangkan untuk kondisi volume penjualan gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,47% atau dengan nilai volume sebesar 333.315 ton. Volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 yang paling tinggi terdapat pelanggan industry yaitu sebesar 85,46% sedangkan untuk nilai kontribusi paling rendah untuk jenis pelanggan terhadap volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020 terdapat di rumah tangga yaitu sebesar 0,23% disusul pelanggan SPBE/SPBG yaitu sebesar 0,41%.

Adapun saran penelitian ini adalah: Diharapkan pemerintah melakukan distribusi volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010- 2020 secara adil dan merata. Diharapkan pemerintah menjaga stabilitas harga dan produksi volume penjualan Gas Alam Melalui Saluran Pipa Menurut Jenis Pelanggan (MMSCF) di Indonesia, 2010-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Asip, F., & Okta, T. (2013). Adsorbsi H₂S pada gas alam menggunakan membran keramik dengan metode titrasi iodometri. *Jurnal Teknik Kimia*, 19(4).
- Atmoko, T. P. H. (2018). Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Di Cavinton Hotel Yogyakarta. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(2), 83-96.
- Iqbal, M. (2016). *Pengembangan Wilayah Daerah Tertinggal Berbasis Komoditas Unggulan Di Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kholiq, I. (2015). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Substitusi BBM. *Jurnal Iptek*, 19(2), 75-91.
- Machmud, M. (2016). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Research Report*.
- Parmadi, P., Emilia, E., & Zulgani, Z. (2018). Daya saing produk unggulan sektor pertanian Indonesia dalam hubungannya dengan pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 77-86.
- Santosa, S. (2011). Multiplier Efek Kampung Industri Kasongan. *Media Wisata*, 6(1), 152-295.
- Sulistyono, S. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS ALAM UNTUK INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL PADA ERA GLOBALISASI. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 7(1).
- Widyaningsih, G. A. (2017). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 139-152.
- Widyastuti, N. L., & Nugroho, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Alam: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 166-176.

ANALISIS KOMODITI EKSPOR PROVINSI JAMBI TAHUN 2017-2021

Analysis of Jambi Province Export Commodities in 2017-2021

Ardi Afrizal

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi
ardiafrizal1985@gmail.com

Diterima : 23 September 2022; Direvisi : 27 November 2022; Disetujui : 30 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.179>

Abstract

The research objective, entitled Analysis of Jambi Province Export Commodities in 2017-2021 with a growth model where it was found that the agricultural sector was the sector with the highest growth rate of 4.10% with an average export value of 166,711,156 (US\$) per year. For the sub-sector, the most dominant export value of agricultural commodities is areca nut with a value of 132,041,479 (US\$). Furthermore, for the export value of the industrial sub-sector, the highest export value was the rubber commodity and its processed products, amounting to 514,476,993 (US\$) and the highest export value for the mining commodity sub-sector was the oil and gas sector of 1,304,594,833 (US\$) or a growth of 9.9%. The government's policy is to maintain the stability of the value of agricultural, industrial and mining exports because the ultimate goal is to improve the welfare of society in general.

Keywords: *Export Commodities Agriculture, industry and mining sectors*

Abstrak

Tujuan penelitian yang berjudul Analisis Komoditi Ekspor Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dengan model pertumbuhan di mana ditemukan perhitungan sektor pertanian merupakan sektor paling tinggi laju pertumbuhannya sebesar 4,10% dengan nilai ekspor rata-rata sebesar 166.711.156 (US\$) pertahun. Sub sektor nilai ekspor komoditi pertanian paling dominan adalah pinang dengan nilai 132.041.479 (US\$). Selanjutnya untuk nilai ekspor sub sektor industri paling tinggi adalah komoditi karet dan olahannya sebesar 514.476.993 (US\$) dan untuk nilai ekspor sub sektor komoditi pertambangan paling tinggi adalah sektor migas sebesar 1.304.594.833 (US\$) atau tumbuh 9,9%. Kebijakan pemerintah adalah perlu menjaga stabilitas nilai ekspor pertanian, industri dan pertambangan karena tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: Komoditi Ekspor Sektor pertanian, industri dan pertambangan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional, meskipun proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini merupakan

Rangkaian proses pertumbuhan ekonomi yang dilakukan di suatu negara untuk meningkatkan aktifitas kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*income* per-kapita) masyarakat disuatu daerah atau Negara dalam jangka waktu yang panjang. Sektor ekonomi itu terdiri dari sektor pertanian, industri dan sektor pertambangan di mana memiliki kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah khususnya Provinsi Jambi. Ekonomi daerah pada dasarnya erat kaitanya dengan industrialisasi dan peran sektor pertanian. Ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat daerah. Tolak ukur keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dapat dilihat dari struktur ekonomi menurut (Ikhsan, 2019) bahwa pendapatan sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, namun pendapatan sektor

target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan secara bertahap. Kemampuan pertumbuhan ekonomi terlihat dari sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian.

pertambangan justru tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Sama halnya pendapatan sektor industri juga tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Berbeda penelitian menurut (Dewiyanti, 2019) bahwa hanya sektor pertanianlah yang justru sangat dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Syarifah, 2020) di mana pentingnya menjaga hasil produksi pertanian, peningkatan ekspor tambang serta pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan yang dapat mengatur keseimbangan perkembangan antar daerah agar kemakmuran yang hendak dicapai dapat lebih ditingkatkan dan didistribusikan secara merata (Jhingan, 1996)

Pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian yang berjudul Analisis Komoditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 yang mana tujuan yang ingin dicapai adalah pertama bagaimana perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi;

kedua, bagaimana perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertanian di Provinsi Jambi; ketiga, bagaimana perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di Provinsi Jambi; dan keempat, bagaimana perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi.

LANDASAN TOERI

1. Pertanian

Pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian (Bukhori, 2014)

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan

ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor (Mardikanto, 2007). Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila

disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Pratomo, 2010).

Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan

2. Industri

Industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin di mana kegiatan yang mengolah bahan mentah, baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, bentuk produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri dapat didefinisikan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang (*cross*

sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi yang bersifat *resource based*. Atas dasar tersebut, potensi perekonomian pedesaan diharapkan akan menjadi determinan dari perekonomian nasional secara keseluruhan dan dengan demikian perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian pedesaan perlu dicermati terutama dampaknya terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di wilayah pedesaan (Resthiningrum, 2011).

elasticities of demand) yang positif dan tinggi (Kuncoro, 2007). Industri memiliki dua arti. Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, yang kedua industri dapat merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 2004).

Pengertian industri menurut Sandy, (1985) dalam (Dianiffa, 2015) ialah untuk memproduksi suatu barang yang berasal dari bahan baku atau bahan mentah dengan proses penggarapan dalam jumlah besar jadi barang tersebut dapat diperoleh melalui harga satuan yang serendah

mungkin tetapi dengan mutu yang setinggi mungkin. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengolah barang dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi hingga barang jadi menjadi barang yang siap untuk digunakan dengan nilai yang lebih tinggi.

3. Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2009, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan berbagai kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan maupun sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batu bara jelaslah sangat berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

selanjutnya diolah dan dianalisis. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertanian, industri dan pertambangan sumber data melalui BPS Provinsi Jambidengan alat analisis yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

a). Untuk menganalisis perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi, maka penelitian ini menggunakan formulasi pertumbuhan:

$$ske = \frac{ske_{t-1} - ske_{t-0}}{ske_{t-0}} \times 100\% \quad \text{dimana,}$$

ske : Sektor komoditi ekspor;
 ske_{t-1} : Sektor komoditi ekspor tahun ke n ; ske_{t-0} : Sektor komoditi ekspor tahun ke e

- b). Untuk menganalisis perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertanian di Provinsi Jambi, maka penelitian ini menggunakan formulasi pertumbuhan $sskep = \frac{sskep_{t-1} - sskep_{t-0}}{sskep_{t-0}} \times 100\%$ dimana, p : Sub sektor komoditi ekspor pertanian; $sskep_{t-1}$: Sektor komoditi ekspor pertanian tahun ke n ; $sskep_{t-0}$: Sektor komoditi ekspor pertanian tahun ke e
- c). Untuk menganalisis perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di Provinsi Jambi, maka penelitian ini menggunakan formulasi

pertumbuhan: $sskei = \frac{sskei_{t-1} - sskei_{t-0}}{sskei_{t-0}} \times 100\%$

- dimana, i : Sub sektor komoditi ekspor industri; $sskei_{t-1}$: Sektor komoditi ekspor industri tahun ke n ; $sskei_{t-0}$: Sektor komoditi ekspor industri tahun ke e
- d). Untuk menganalisis perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi, maka penelitian ini menggunakan formulasi pertumbuhan: $sskep = \frac{sskep_{t-1} - sskep_{t-0}}{sskep_{t-0}} \times 100\%$ dimana $sskep$: Sub sektor komoditi ekspor pertambangan; $sskep_{t-1}$: Sektor komoditi ekspor pertambangan tahun ke n ; $sskep_{t-0}$: Sektor komoditi ekspor pertambangan tahun ke e

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan analisis perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Tahun	Pertanian	%	Industri	%	Pertambangan	%
2017	164.825.728	~	1.185.963.151	~	1.202.693.566	~
2018	168.481.549	2,2	995.351.448	-16	1.900.441.298	36,7
2019	178.327.115	5,8	977.799.121	-2	1.685.100.534	-13
2020	136.556.843	-23	797.758.123	-18	842.270.692	-100
2021	185.364.543	36	875.561.826	10	1.328.735.269	36,6
Rata	166.711.156	4,1	966.486.734	-5	1.391.848.272	-7,9

Sumber: BPS data diolah 2022

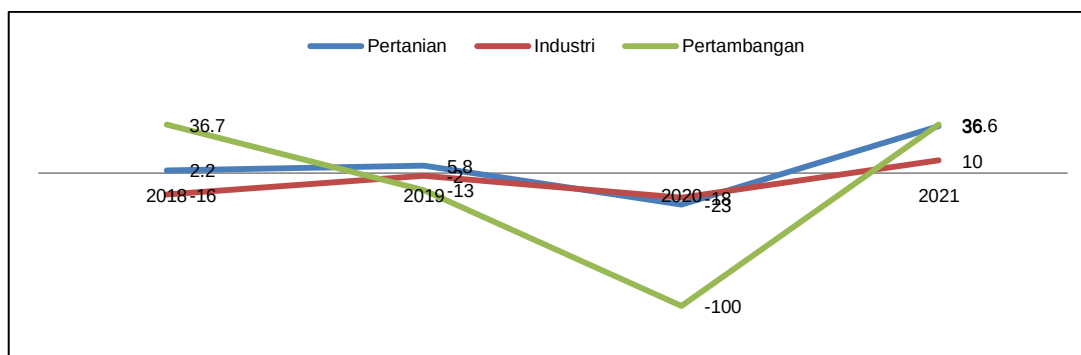
Temuan penelitian tentang perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi selama tahun 2017-2021 yaitu untuk sektor pertanian rata-rata sebesar 166.711.156 (US\$) atau tumbuh 4,10% di mana sektor pertanian khususnya ketahanan pangan masih bertumpu pada level menengah kecil dan masalah pangan merupakan sektor yang selalu di butuhkan manusia sebagai konsumen. Untuk itu, petani dan UKM terus berinovasi bukan hanya menguasai pasar di domestik saja, melainkan meningkatkan ekspor untuk komoditas-komoditas pertanian tertentu. Untuk sektor industri rata-rata sebesar 966.486.734 (US\$) atau tumbuh -5% yang terindikasi terdampak melemahnya perekonomian global melambatnya ini antara lain karena permintaan dari luar negeri terganggu karena tekanan ekonomi global, khususnya di Eropa. Selain itu inputnya yang cukup tinggi, berkaitan bahan baku baik ketersediaan maupun harga.

Pertumbuhan sektor industri paling tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 10% dengan nilai ekspor 875.561.826 (US\$) dan untuk kondisi pertumbuhan sektor industri paling rendah pada tahun 2020 sebesar -18% dengan nilai ekspor 797.758.123

(US\$). Kemudian sektor pertambangan di mana untuk nilai pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 37,9% dengan nilai ekspor yaitu sebesar 1.900.441.298 (US\$). Namun pada tahun 2020 perkembangan sektor pertambangan justru mengalami terjun bebas hingga menjadi sebesar -100% dengan nilai ekspor sebesar 842.270.692 (US\$) di mana faktor pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan dari catatan buruk sektor pertambangan khususnya Provinsi Jambi sehingga turunnya daya beli konsumen dan turunnya tingkat produksi yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan permintaan energi belum lagi beberapa pabrik sampai menghentikan operasinya

Selanjutnya untuk kondisi sektor pertanian paling tinggi tumbuh pada tahun 2021 sebesar 36% dengan nilai ekspor 185.364.543 (US\$) dan kondisi pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar -23% yang mana kondisi ini bersamaan dengan kondisi ekonomi yang terjun bebas akibat wabah covid 19.

Secara akumulasi kondisi fluktuasi perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 terlihat pada (gambar 1) di bawah ini:



Sumber: data BPS diolah 2022

Gambar 1. Perkembangan sektor komoditi ekspor di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Hasil temuan analisis tahun 2017-2021 terlihat pada tabel perkembangan sub sektor komoditi dibawah ini:
ekspor pertanian di Provinsi Jambi

Tabel 2. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Tahun	Pertanian							
	1. Ikan dan Udang	%	2. Pinang	%	3. Kopi, Teh, rempah-rempah	%	4. Lainnya	%
2017	24.523	-	132.720.305	-	23.686.729	-	8.394.171	-
2018	24.317	-0,84	139.330.575	4,98	25.862.339	9,18	3.264.318	-61,1
2019	34.988	43,88	145.131.617	4,16	30.997.675	19,86	2.162.833	-33,7
2020	29.444	-15,85	101.231.959	-30,25	30.359.537	-2,06	4.935.905	128,2
2021	0	0,00	141.792.938	40,07	34.698.899	14,29	8.872.706	79,8
Rata	22.654	5,44	132.041.479	3,79	29.121.036	8,26	5.525.987	22,6

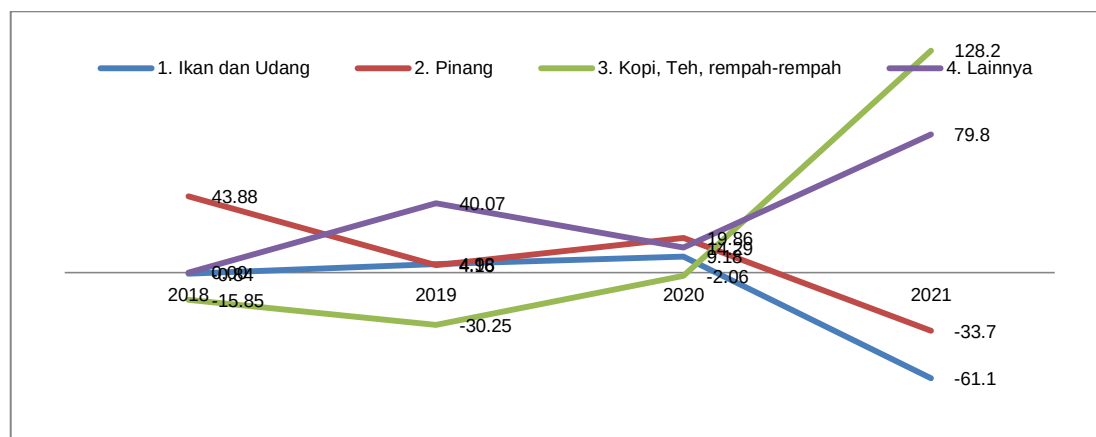
Sumber: BPS data diolah 2022

Temuan penelitian untuk sub sektor komoditi pertanian seperti sektor ikan dan udang rata-rata sebesar 22.654 (US\$) atau tumbuh sebesar 5,44%, untuk sub sektor pinang sebesar 132.041.479 (US\$) atau tumbuh 3,79\$, untuk sub sektor kopi, teh dan rempah-rempah sebesar 29.121.036 (US\$) atau tumbuh 8,26% dan untuk sub sektor lainnya sebesar 5.525.987 (US\$) atau tumbuh sebesar 22,6%.

Keempat sub sektor komoditi pertanian tersebut ditemukan bahwa komoditi pinang merupakan sektor dengan nilai ekspor paling tinggi disusul komoditi komoditi ikan dan udang dengan nilai ekspor paling rendah. Sementara sektor pertanian di Provinsi Jambi saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil bahkan di Indonesia lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat nasional bekerja di sektor pertanian.

Berbagai upaya agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Provinsi Jambi sehingga menjadi kekuatan ekonomi di daerah. Secara

akumulasi fluktuasi perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertanian di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 terlihat pada (gambar 2) di bawah ini:



Sumber: data BPS diolah 2022

Gambar 2. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertanian di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Hasil temuan analisis perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di

Provinsi Jambi tahun 2017-2021 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022

Tahun	Industri									
	1. Minyak Nabati	%	2. Karet & Olahannya	%	3. Kayu Lapis & Olahan Lainnya	%	4. Arang	%	5. Pulp dan Kertas	6. Lainnya
2017	189.474.411		700.837.105		27.062.116		506.428		264.756.474	3.326.618
2018	192.523.662	1,61	550.114.999	-21,5	40.946.476	51,31	1.054.913	108,3	207.833.197	-21,5
2019	219.894.321	14,22	450.801.012	-18,1	48.848.530	19,30	653.478	-38,1	256.867.334	23,6
2020	206.609.113	-6,04	385.728.839	-14,4	44.100.025	-9,72	307.649	-52,9	157.003.317	-38,9
2021	286.004.530	38,43	484.903.008	25,7	38.161.146	-13,47	231.468	-24,8	63.660.418	-59,5
Rata	218.901.207	10	514.476.993	-5,7	39.823.659	9,5	550.787	-1,5	190.024.148	-19,2

Sumber: BPS data diolah 2022

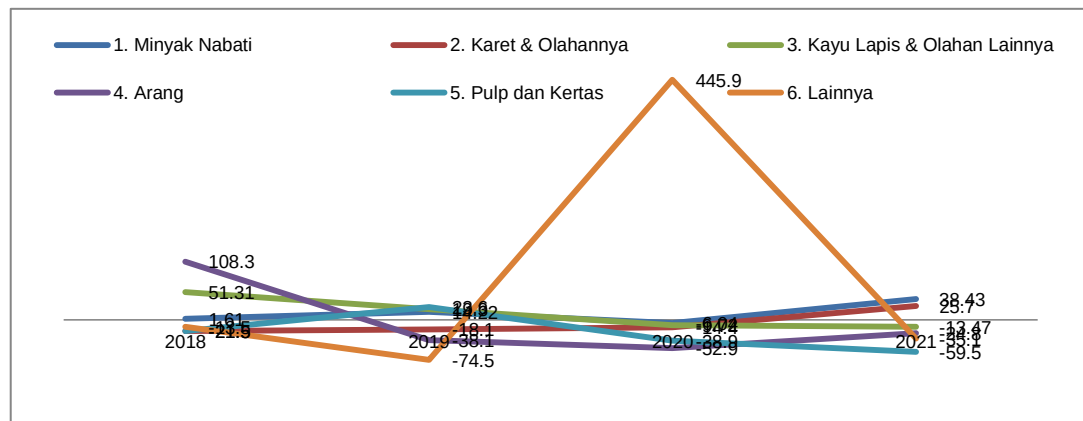
Temuan penelitian terkait dengan perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dimana untuk sub sektor minyak nabati rata-rata sebesar 218.901.207 (US\$) atau tumbuh 10%,

untuk komoditi sub sektor karet dan olahannya sebesar 514.476.993 (US\$) atau tumbuh -5,7%, untuk sub sektor kayu lapis dan olahan lainnya sebesar 39.823.659 (US\$) atau tumbuh 9,5%, untuk sub sektor arang sebesar

550.787 (US\$) atau tumbuh -1,5%, untuk sub sektor pulp dan kertas sebesar 190.024.148 (US\$) atau tumbuh -19,2% dan untuk sub sektor lainnya sebesar 2.709.940 (US\$) atau tumbuh sebesar 64,6%.

Nilai sub sektor komoditi industri paling tinggi adalah sektor karet dan olahannya dan untuk nilai ekspor komoditi sub sektor industri paling rendah adalah sub sektor untuk komoditi arang. Pada dasarnya sektor

komoditi industri merupakan kekuatan-kekuatan yang kita miliki merupakan modal kuat untuk membangun khususnya Provinsi Jambi, termasuk kemampuan hilirisasi dan industrialisasi untuk memaksimalkan nilai tambah bagi kepentingan nasional. Secara akumulasi untuk melihat fluktuasi kondisi perkembangan sub sektor komoditi ekspor industry di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 terlihat pada (gambar 3) di bawah ini:



Sumber: data BPS diolah 2022

Gambar 3. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022

Hasil temuan analisis perkembangan pertambangan di Provinsi Jambi sub sektor komoditi ekspor terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

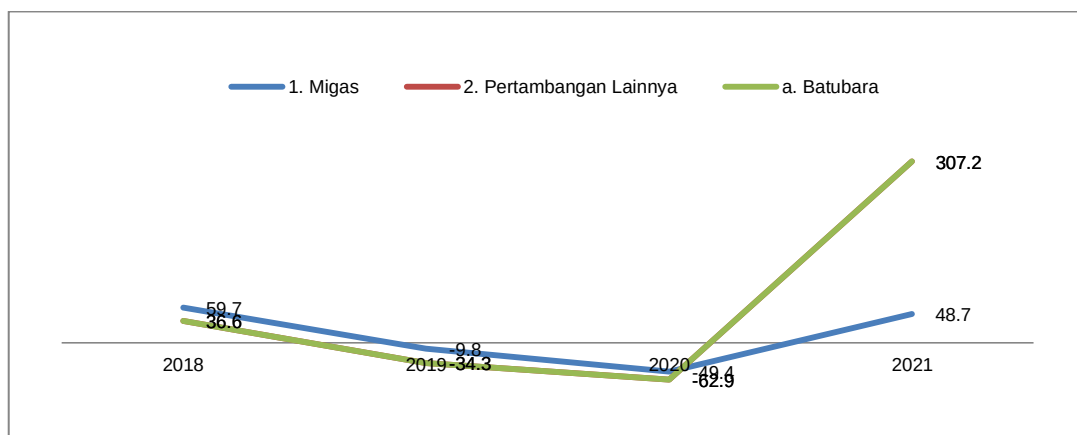
Tahun	Pertambangan					
	1. Migas	%	2. Pertambangan Lainnya	%	a. Batubara	%
2017	1.114.635.568		88.057.999		88.057.999	
2018	1.780.169.614	59,7	120.271.685	36,6	120.271.685	36,6
2019	1.606.038.653	-9,8	79.061.879	-34,3	79.061.609	-34,3
2020	812.918.224	-49,4	29.352.467	-62,9	29.352.467	-62,9
2021	1.209.212.105	48,7	119.523.164	307,2	119.523.164	307,2
Rata	1.304.594.833	9,9	87.253.439	49,3	87.253.385	49,3

Sumber: BPS data diolah 2022

Analisis Komoditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Temuan penelitian terkait perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi tahun 2017-2020 dimana untuk sub sektor komoditi migas rata-rata sebesar 1.304.594.833 (US\$) atau tumbuh 9,9% untuk sub sektor komoditi pertambangan lainnya sebesar 87.253.439 (US\$) atau tumbuh 49,3% dan untuk kondisi sub sektor komoditi batu bara sebesar 87.253.385 (US\$) atau tumbuh 49,31% yang mana sub sektor komoditi migas merupakan

sektor dengan nilai ekspor tertinggi selama 5 tahun terakhir di mana dominasi sektor pertambangan dapat mempengaruhi akan perubahan struktur perekonomian daerah yang terlihat pada distribusi sektor pertambangan terhadap total PDRB. Secara umum untuk melihat fluktuasi kondisi perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 terlihat pada (gambar 4) di bawah ini:



Sumber: data diolah 2022

Gambar 4. Perkembangan sub sektor komoditi ekspor pertambangan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian bahwa pertumbuhan sektor pertambangan rata-rata sebesar 49,30% dengan nilai ekspor sebesar 87.253.493 (US\$), untuk komoditi pertanian dimana komoditi pinang merupakan sektor dengan nilai ekspor paling tinggi serta untuk sub sektor komoditi ekspor

industri di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 dimana sub sektor komoditi industri paling tinggi adalah sektor karet dan olahan.

Saran untuk sektor pertanian diharapkan pemerintah dapat meningkatkan nilai ekspor komoditi sektor pertanian dan menjaga stabilitas produksi hasil pertanian khususnya

produksi pinang di Provinsi Jambi. Kemudian saran untuk sektor industri diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas produksi karet dan olahannya dan untuk saran sektor pertambangan diharapkan pemerintah meningkatkan dan menjaga stabilitas sektor migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ikhsan, 2019. Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/7700>
- Bukhori. M, 2014. Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia. Surabaya. Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
<https://adoc.pub/download/sektor-pertanian-terhadap-pembangunan-di-indonesia.html>
- Dumairy, 2004. Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gatot Suparamono, 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Jhingan, 1996. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Rajawali press. Jogjakarta
- Kuncoro, Mudrajat, 2007. Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Lailatis Syarifah, 2020. Kontribusi Sektor Pertanian, Sektor Pertmbangan Dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2016.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/>
- Mardikanto, Totok. 2014. Sektor Pertanian. Alfabeta. Bandung
- Pratomo, S. 2010. Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali. Skripsi S1 FE UNS. Surakarta
- Resthiningrum, R. 2011. Keragaan dan Peranan Sektor Pertanian Dalam. Perekonomian Wilayah di Kabupaten Blora. Skripsi S1 Fakultas Pertanian. USU
- Resky Dewiyanti, 2019. Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep.
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

PEDOMAN PENULISAN

1. Jurnal Khazanah Intelektual terbit tiga kali setahun, mempublikasikan karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan gagasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebijakan dan inovasi daerah khususnya di lingkup Provinsi Jambi.
2. Struktur tulisan terdiri dari :
 - a. Judul karangan singkat;
 - b. Nama dan alamat penulis;
 - c. Abstrak atau intisari, dalam 2 bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing maksimal 250 kata;
 - d. Untuk keseragaman karya tulis harus meliputi : Pendahuluan (tercakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan), Landasan Teori, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka dan biodata penulis serta capaian terimakasih.
 - e. Penulisan dibuat dalam format A4, tulisan arial font 12, spasi 1,5 dan lay out : sisi kiri 3,5 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm.
3. Kepustakaan di dalam naskah disusun menurut angka sesuai dengan pedoman Vancouver.
 - a. Nama keluarga serta huruf pertama nama kecil;
 - b. Tahun Terbitan
 - c. Judul karangan;
 - d. Nama majalah dengan indeks medicus;
 - e. Tahun, volume, dan halaman;
 - f. Dalam teks, nomor rujukan sesuai dengan urutan pengutipan

Contoh :

1. Subradja, D. 2004 *Obesitas Primer pada Anak*. PT. Kiblat Utama. Bandung
 2. Abuasir, S., N. Hakim dan Y. Sumitro. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Adopsi Sistem Usaha tani Mina Padi di Desa Pujo Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Jurnal KPM Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Vol.1. No.1, April 2004.
-
4. Tulisan dikirim keredaksi melalui Open Jurnal System (OJS) dengan alamat : jurnal.ki.balitbangdajbi.com dengan menyertakan biodata lengkap yang berisi :
 - a. Nama lengkap penulis;
 - b. Identitas tempat kerja;
 - c. Alamat yang dapat dihubungi dan telepon;
 - d. Bidang kepakaran;
 - e. Pernyataan bahwa tulisan tersebut asli dan belum dipublikasikan di media lain.